



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025



Jalan Brigjend H. Hasan Basery No. 02 Telp (0517) 31437 Kode Pos 71111

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 - 2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang kebudayaan dan pariwisata. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan kebudayaan dan pariwisata bagi Pemerintah Kabupaten Tapin secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan pertanian dan pangan yang lebih baik di Kabupaten Tapin. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada khususnya, sehingga pelestarian budaya dan peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapin dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rantau, 25 Juli 2025

Kepala Dinas,



Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	26
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	26
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	3
2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	31
2.2.2 Isu Strategis	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	56
3.3 Program-Program Prioritas dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan	64
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	65
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025-2029	66
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025-2029	67
BAB V PENUTUP	68



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin ini adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Menjadi acuan penyusunan LKJiP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang seni budaya dan pariwisata.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029.

Usaha mewujudkan RPJMD Kabupaten Tapin yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 serta indikator sebagaimana disebutkan di atas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tapin untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 - 2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang kebudayaan dan pariwisata. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan kebudayaan dan pariwisata bagi Pemerintah Kabupaten Tapin secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan pertanian dan pangan yang lebih baik di Kabupaten Tapin. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada khususnya, sehingga pelestarian budaya dan peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapin dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rantau, 25 Juli 2025

Kepala Dinas,



Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	26
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	26
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	3
2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	31
2.2.2 Isu Strategis	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	52
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	52
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	61
3.3 Program-Program Prioritas dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	64
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan	66
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	67
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025-2029	67
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025-2029	69
BAB V PENUTUP	70



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin ini adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Menjadi acuan penyusunan LKJiP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang seni budaya dan pariwisata.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029.

Usaha mewujudkan RPJMD Kabupaten Tapin yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 serta indikator sebagaimana disebutkan di atas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tapin untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RENSTRA Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
6. Undang-Undang yang mengatur tentang kebudayaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022 – 2025.



24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09)
27. Perda Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tanggal 20 Agustus 2025.
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2025-2029 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 31) Tanggal 19 September 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA SKPD ini dimaksudkan untuk membuat rencana pembangunan lima tahunan SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029.

Tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin 2025-2029 adalah :

- a. Menjadi acuan/ pedoman penyusunan Rencana Kerja dan acuan penyusunan DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin selama tiga tahun kedepan.
- b. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
- c. Menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin selama periode 2025-2029



- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun kedepan mendatang.
- e. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.3 Program-Program Prioritas dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025-2029
 - 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

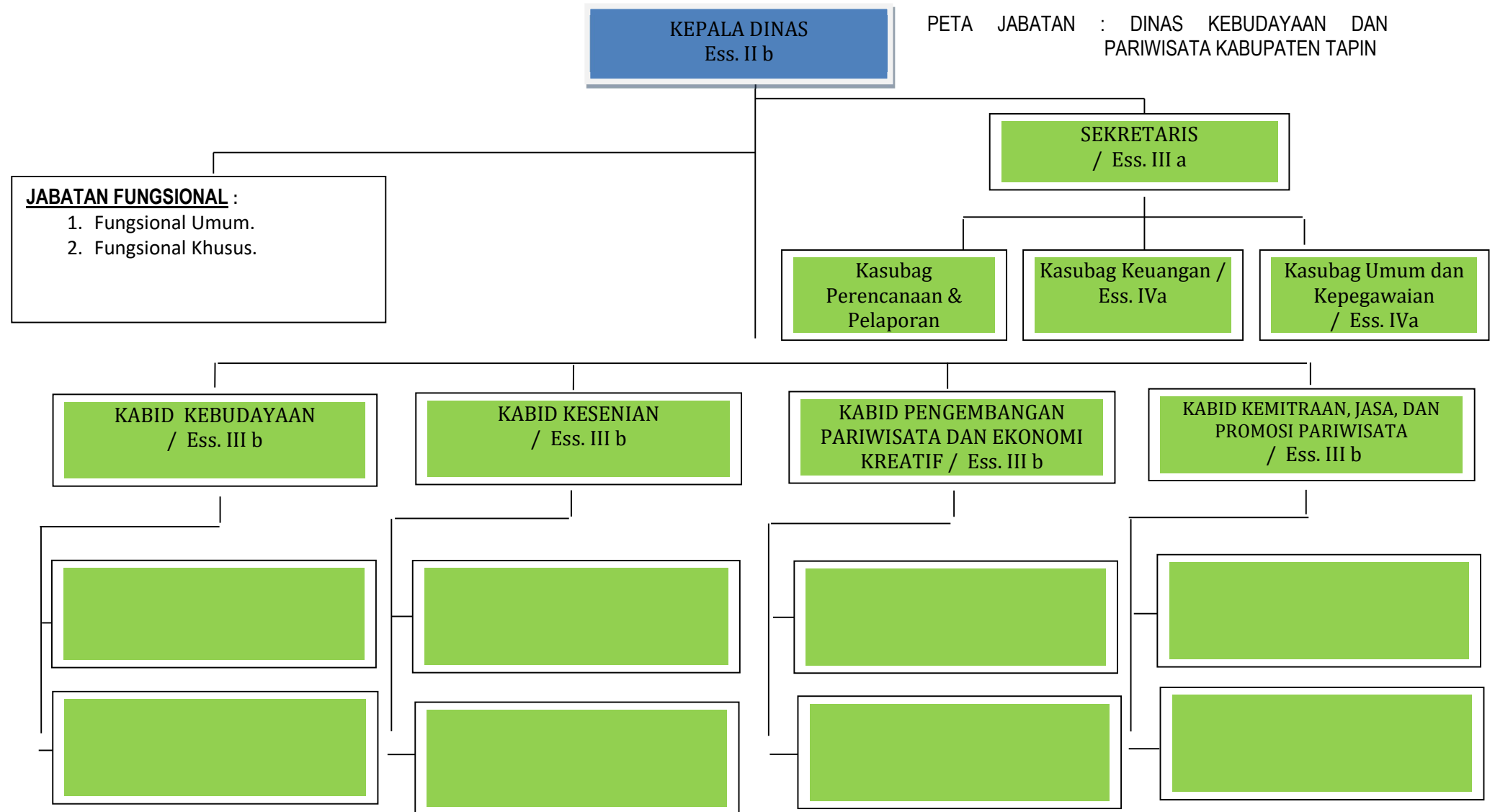
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh :

- a. Sekretariat, meliputi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian
 - Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
 - b. Bidang Kebudayaan, meliputi :
 - Kepala Seksi Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Tradisi, Bahasa dan Sastra
 - Kepala Seksi Perlindungan & Konservasi Cagar Budaya
 - c. Bidang Kesenian, meliputi :
 - Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah
 - Kepala Seksi Pementasan dan Pagelaran Seni-Budaya
 - d. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi:
 - Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata
 - Kepala Seksi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif
 - e. Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata, meliputi :
 - Kepala Seksi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata
 - Kepala Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum
- Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2022 adalah sebagai berikut :





2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Th 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2018 , tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan, urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan wajib Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin terdiri dari :

- a. Urusan Wajib Budaya
- b. Urusan pilihan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin no. 38 Tahun 2018, Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata;
- c. pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan;



- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata;
- e. pelayanan umum dan perekomendasi perizinan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- g. Pengelolaan Kesekretariatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan fungsi :
 - 1. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - 2. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - 3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - 4. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 - 5. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - 6. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - 7. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat



- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik (Rensta), Rencana kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terintegrasi;
 4. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan; dan
 8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Uraian tugas sub bagian keuangan adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;



4. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;
 5. menyiapkan bahan dan mengelolaa penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
 6. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 7. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang dan kewenangannya.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 2. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 4. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 6. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;



7. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 8. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
 9. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
 10. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 11. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
 12. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 13. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
 14. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset;
 15. melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 16. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
 17. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 18. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- e. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra serta perlindungan



dan konservasi Cagar Budaya. Uraian tugas bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

- 1.pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra serta perlindungan dan konservasi Cagar Budaya;
 2. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan;
 3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 4. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 5. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 6. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 7. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
 8. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan museum kabupaten;
 9. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan pelaksanaan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebudayaan;
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- f. Seksi Pelestarian Sejarah Nilai Tradisi, Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan



pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra. Uraian tugas seksi pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pelestarian sejarah, nilai tradisi dan sastra;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendaftaran budaya tak benda, pembinaan komunitas dan lembaga adat;
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, dan tenaga kebudayaan lainnya;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan;
9. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian serta kriteria sistem pemberian penghargaan bagi insan atau lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan, nilai-nilai tradisi, apresiasi seni, penulisan sejarah lokal dan kebudayaan daerah, penanaman nilai-nilai sejarah;
10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra; dan
12. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



- g. Seksi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan perlindungan dan konservasi cagar budaya. Uraian tugas seksi perlindungan dan konservasi cagar budaya adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan dan konservasi cagar budaya;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan konservasi cagar budaya;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan dan konservasi cagar budaya;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan cagar budaya;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
 7. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan dan konservasi cagar budaya;
 9. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan dan konservasi cagar budaya; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- h. Bidang Kesenian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah serta pementasan dan pagelaran seni budaya. Uraian tugas bidang kesenian adalah sebagai berikut :
1. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan kesenian daerah serta pementasan dan pagelaran seni budaya;



2. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kesenian;
 3. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 4. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pementasan dan pagelaran seni budaya;
 5. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tenaga kesenian;
 6. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
 7. menyingkronisasikan kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan kesenian daerah serta pementasan dan pagelaran seni budaya; dan
 8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian.
- i. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah. Uraian tugas seksi pelestarian dan pengembangan kesenian daerah adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kesenian daerah;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;



6. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 8. menyiapkan bahan dan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perizinan sanggar seni tari dan teater;
 10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelestarian dan pengembangan kesenian daerah; dan
 12. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- j. Seksi Pementasan dan Pagelaran Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pementasan dan pagelaran seni budaya. Uraian tugas seksi pementasan dan pagelaran seni budaya adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pementasan dan pagelaran seni budaya;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pementasan dan pagelaran seni budaya;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pementasan dan pagelaran seni budaya;
 4. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pementasan dan pagelaran seni budaya;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pementasan dan pagelaran seni budaya;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pementasan dan pagelaran seni budaya;



7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pementasan dan pagelaran seni budaya;
 9. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pementasan dan pagelaran seni budaya; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- k. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, serta bina usaha dan ekonomi kreatif. Uraian tugas bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :
1. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 3. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bina usaha dan ekonomi kreatif;
 4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan daya Tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata;
 5. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 6. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
 7. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;



8. menyingkronisasikan kegiatan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif ;
 9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
-
1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Uraian tugas seksi pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata adalah sebagai berikut :
 1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata kabupaten;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata lingkup kabupaten;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 9. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



- m. Seksi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan bina usaha dan ekonomi kreatif. Uraian tugas seksi bina usaha dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bina usaha dan ekonomi kreatif;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bina usaha dan ekonomi kreatif;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina usaha dan ekonomi kreatif;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyediaan sarana dan prasarana sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif terhadap 16 subsektor ekonomi kreatif, aktor (pemerintah, komunitas, akademisi dan bisnis), serta daya ungkit di kabupaten;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif melalui penguatan riset edukasi dan pengembangan, pendirian inkubator, pendampingan untuk mendapatkan akses terhadap permodalan bagi start-up/pemula, membuka akses pasar untuk memasarkan produk, pendirian klinik-klinik HKI, serta memperkuat jejaring/network pelaku ekonomi kreatif di kabupaten;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan suprastruktur : fisik dan non-fisik/TIK yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, kelembagaan, serta sinergi antar aktor (pemerintah, komunitas, akademisi, dan bisnis) di kabupaten;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bina usaha dan ekonomi kreatif;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang bina usaha dan ekonomi kreatif;
 10. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bina usaha dan ekonomi kreatif; dan



11. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- n. Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan jasa, promosi, pemasaran pariwisata, kemitraan, hiburan dan rekreasi umum. Uraian tugas bidang kemitraan, jasa dan promosi pariwisata adalah sbagai berikut :
1. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata;
 2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 3. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemasaran dan promosi daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata baik dalam dan luar negeri;
 5. menyingkronisasikan kegiatan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif ;
 6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- o. Seksi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan jasa, promosi dan pemasaran pariwisata. Uraian tugas seksi jasa, promosi dan pemasaran pariwisata adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;



3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jasa pariwisata;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pemasaran, dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja jasa, promosi dan pemasaran pariwisata; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- p. Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum. Uraian tugas seksi kemitraan, hiburan dan rekreasi adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;



7. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kemitraan, hiburan dan rekreasi umum; dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Berikut ini adalah gambaran umum Kebudayaan dan Pariwisata Tapin
Kawasan cagar budaya meliputi:

- Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- Mesjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- Mesjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam TasanPanyi di Kecamatan Tapin Utara; Mesjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- Mesjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur; Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; dan
- Mesjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah

Kawasan peruntukan pariwisata

1. Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.



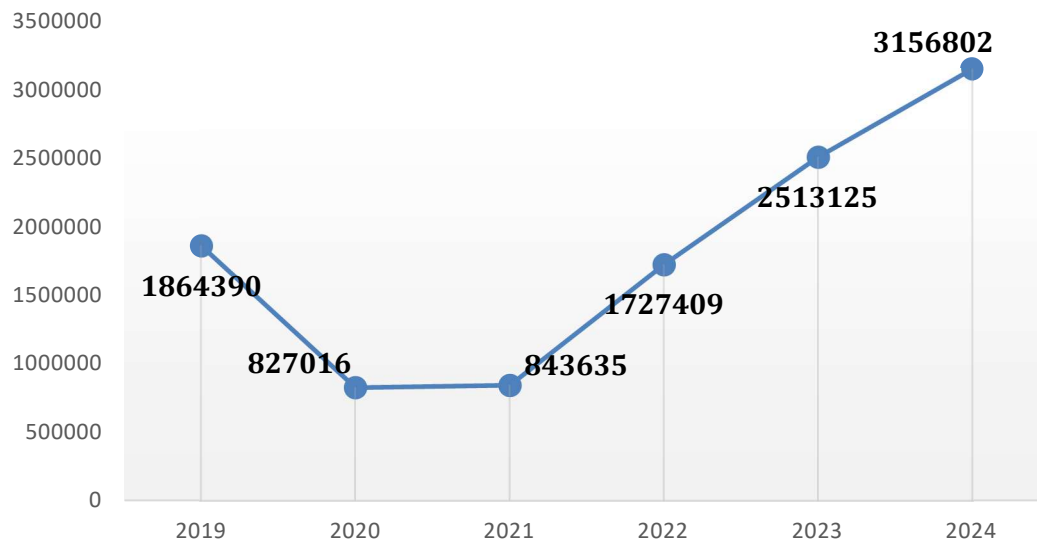
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
 - a. Wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;
 - b. Wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
 - c. Wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
 - d. Wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;
 - e. Wisata alam air terjun Mandian Junit di Kecamatan Piani;
 - f. Wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
 - g. Wisata alam Peranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
 - h. Wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;
 - i. Wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
 - j. Wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candilaras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
 - k. Wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
 - l. Wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.
3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
 - a. Kawasan wisata budaya:
 - 1) Perahu Naga di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - 2) Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara;
 - 3) Situs Candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - 4) Aruh Ganal di Kecamatan Piani.
 - b. Kawasan wisata religius:
 - 1) Makam Datu Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2) Makam Syekh Salman Al Farisi di Kecamatan Bakarangan;
 - 3) Majelis ta'lim di Kecamatan Tapin Tengah.
 - 4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan dan kerajinan anyaman di Kecamatan Candi Laras Selatan



Gambaran Kunjungan Wisatawan selama 5 tahun terakhir

Kunjungan wisatawan ke Kabupten Tapin (domestik dan luar negeri) selama tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi, khususnya pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan masa terjadinya Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022, setelah dilaksanakannya penanganan dan pemulihan dampak Covid-19, angka kunjungan wisatawan meningkat kembali hingga mencapai 1,7 juta wisatawan, dan tahun berikutnya, 2023 dan 2024 terus mengalami peningkatan.

Grafik II.8
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2024



2.1.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari 23 orang ASN dan 21 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).



Tabel 2.1
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kepangkatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025
1	Jumlah PNS	23
2	Kualifikasi	
	a. Tingkat pendidikan	
	1. SLTA	4
	2. DIPLOMA	1
	3. S 1	12
	4. S 2	6
	c. Pangkat/ golongan ruang	
	1. Pengatur Tk.I	1
	2. Penata Muda	4
	3. Penata Muda Tk.I	3
	4. Penata	1
	5. Penata Tk.I	7
	6. Pembina	4
	7. Pembina Tk.I	1
	8. Pembina Utama Muda	1
	e. Jenis kelamin	
	1) Laki-laki	7
	2) Perempuan	6

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjenis kelamin perempuan, yaitu 16 orang dan laki-laki hanya 7 orang. Tingkat pendidikan PNS terbanyak adalah sarjana (S1), sebanyak 12 orang dan jenjang pangkat terbanyak adalah Penata Tingkat 1 golongan ruang III/d.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau aset Disbudpar Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Disbudpar

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Kualitas	
		2025	Baik	Rusak
I	PERALATAN DAN MESIN			
1	Alat rumah tangga lain-lain	166	140	26
2	Moubiler Lainnya	9	16	3
3	Kendaraan bermotor khusus lain-lain	9	9	-
4	Peralatan dapur	2	2	-
5	Sound system	1	1	-
6	AC Unit	14	12	2
7	Peralatan Jaringan	2	2	-
8	Handy Cam	2	2	-
9	P.C Unit	23	15	8
10	Lap Top	11	10	1
11	Printer	24	14	10
12	Meja Kerja	40	30	10
13	Kursi Kerja	49	39	10
14	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	5	5
15	Proyektor + Attachment	3	2	1
16	Camera Electronic	1	1	-
17	Camera Digital	5	5	-
18	Dispenser	4	2	2
19	Papan Visual Run Text	1	-	1
20	Papan Nama Instansi	5	5	-
21	Papan Pengumuman	6	1	5
21	Mesin Tik	1	1	-
			-	-
II	GEDUNG DAN BANGUNAN	5	5	-
1	Bangunan gedung kantor lain-lain	2	2	-
2	Bangunan gedung kantor permanen	12	11	1
3	Bangunan gedung tertutup permanen	-	-	-
4	Bangunan tempat kerja lainnya	3	2	1
5	Bangunan terbuka semi permanen	-	-	-
6	Tugu pembangunan	3	2	1
7	Rumah adat	1	1	-
8	Makam Sejarah	6	6	-



			-	-
III	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		-	-
	Pemasangan Jaringan Listrik di			
1	Makam Datu Sarifah Aminah Binuang	1	1	-
			-	-
IV	ASET TETAP LAINNYA		-	-
1	Alat Musik Nasional/Daerah	70	64	6
2	Alat Kesenian lain-lain	111	90	11
3	Barang kerajinan lain-lain	3	-	3
4	Barang koleksi rumah tangga	1	1	-
5	Alat musik band	2	2	-
6	Generator set (genset)	2	1	1
V	TANAH	1	1	-
			-	-

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin telah memiliki sarana prasarana yang memadai, namun untuk meja dan kursi serta masih dianggap sangat kurang untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Disbudpar Kabupaten Tapin juga belum memiliki mobil dinas untuk kegiatan lapangan sehingga menghambat kegiatan lapangan. Dengan demikian kedepannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin berharap bisa mendapatkan tambahan sarana dan prasarana agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih baik lagi

c. Kinerja Pelayanan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin menangani urusan bukan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata.



Capaian Kinerja SDG's Tahun 2023 dan 2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals merupakan komitmen global dan nasional dalam Pembangunan berkelanjutan yang menyepakati 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Adapun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait pada Rencana Aksi Daerah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Adapun target dan capaian terkait Tujuan SDG's adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian SDGs Tahun 2023-2024

Target	Kode	Indikator	2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	realisasi
8.9 pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1.(a)	Jumlah wisata mancanegara	100	82	100	90
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1727390	2513043	3141304	3.156.712
	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi	5,75	1,93	5,76	2,03



		pariwisata terhadap PDRB				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tapin berperan dalam mencapai sasaran "Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah" dengan 5 indikator dan "meningkatkan Pelestarian Budaya dengan 2 indikator, Meningkatkan capaian LAKIP/LKJIP Perangkat Daerah dengan 1 indikator dan Meningkatkan Nilai IP-ASN Perangkat Daerah dengan 1 indikator.

Berikut ini tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Disbudpar tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 :



Tabel. 2.4
Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	20	(55,64)	(278,2)	25	25,22	100,88	30	66,80%	222,66	45	45,48	101	25	25,61	102,44
	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	-	-		4 jam	-	-	5 jam	3 Jam 40 Menit	73,4	4 jam 42 menit	4 jam 42 menit	100	4 jam 45 menit	4 jam 48 menit	68%
	Rata-Rata Belanja Wisatawan	-	-		Rp 50.000	-	-	Rp 60.000	Rp 566.758	100	Rp595.000	Rp595.000	100	Rp 600.000	Rp 600000	100
Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan (%)	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	18,75	27,7	145,44



	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7,14	71,4
	persentase cagar budaya yang dilindungi (%)	-	-	-	80	100	125	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi
	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	-	-	-	-	-	-	90	100	111,11	14,85	18,18	122	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%)	-	-	-	-	-	-	50	67,51	135,02	70	71,28	101	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi	Indikator tidak digunakan lagi
Meningkatnya Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	67,98	-	-	76,10	-	-	-	-	74	73,85	99,79	74	78,95	106,68
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,50	18,50	100	30	73,81	246,3



Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan capaian indikator kinerja utama selama tahun 2020 kinerja kunjungan wisatawan mengalami penurunan karena adanya Pandemi Covid 19, namun 2021 - 2024 dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang Disbudpar Kabupaten Tapin secara umum sangat baik walaupun ada indikator yang masih belum mencapai target atau capaian rendah.

Pada indikator kinerja "persentase peningkatan kunjungan wisatawan" dengan sasaran "meningkatnya daya saing pariwisata daerah" untuk tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 25,61% dengan target 25%, dengan begitu capaian pada indikator ini 102,44%. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebenarnya realisasi ini mengalami penurunan dalam hal persentase peningkatan kunjungan wisatawan.

Selain itu indikator kinerja "rata-rata lama tinggal wisatawan" dan "rata-rata belanja wisatawan" sama-sama menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, begitupula dengan "indeks profesionalisme ASN" yang pada tahun 2024 ini mendapatkan realisasi kinerja sangat besar yakni 73,81, sedangkan untuk tahun 2023 hanya berada diangka 18,50.

Sedangkan indikator "persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan" dan "persentase cagar budaya yang ditetapkan" merupakan indikator baru pada perubahan perjanjian kinerja tahun 2024, jadi tidak ada nilai perbandingan dengan tahun sebelumnya



Tabel. 2.5
Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah															
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	0	0	0	0	0	0	10	19	190	10	331	331	10	9,76	97,6
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	20	(55,64)	(278,2)	25	25,22	100,88	30	66,80	73,4	45	45,48	101	25	25,61	102,44
Tingkat Hunian Akomodasi	20	14,99	74,95	30	29,27	97,56	50	56,76	113,52	50	44,51	89,02	90	80,86	89,84
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6	5,7	95	6	5,4	90	7	5,72	81,74	2,5	1,93	77,2	2,5	2,03	81,2
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4	2,54	63,5	4	2,57	64,25	5	4,41	88,2	10	6,27	6,27	10	9,19	91,9



Telestarikannya Cagar Budaya															
Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat bahwa selisih antara target dan realisasi tidak terlalu signifikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa target sasaran telah tercapai dengan baik, bahkan ada yang realisasinya mencapai lebih dari 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain adanya konsistennya pelaksanaan program dan keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan adanya dukungan ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja, hanya saja sarana prasarana pariwisata dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pariwisata masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan jumlah dan kualitas sumber daya manusia belum memadai, di samping itu masih terbatasnya dukungan dana terhadap pariwisata serta kurangnya sinergitas antar SKPD terkait.



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah	4.570.460.246	7.802.786.687	11.892.415.353	10.329.113.219	13.679.666.109	4.042.951.114	7.184.969.192	7.726.547.780	8.571.684.633	11.869.071.206	88,46	93,86	65	82,99	86,77



Sementara itu, dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disbudpar Kabupaten Tapin selama tahun 2021 dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran di tahun dapat dikatakan baik dengan realisasi anggaran 92% dan realisasi capaian kinerja 92,18. Untuk tahun 2020 karena adanya pandemic covid 19 sehingga pencapaian kinerja tidak maksimal karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Dari hasil tersebut Disbudpar Kabupaten Tapin menemukan potensi dan permasalahan dalam pelayanan Disbudpar. Adapun potensi Disbudpar Kabupaten Tapin adalah pengembangan melalui pembinaan sumber daya manusia sebagai faktor pendukung pengembangan seni budaya dan pariwisata Kabupaten Tapin.

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disbudpar Kabupaten Tapin dan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Untuk menghadapi tantangan dan menyelenggaraan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja Disbudpar Kabupaten Tapin 2025-2029 di bawah ini

Tabel 2.7

Perkiraan Anggaran Belanja Disbudpar Kabupaten Tapin 2025-2030

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anggaran	Rp 7.498.918.008	Rp 7.633.068.291	Rp 8.047.406.795	Rp 8.465.845.416	Rp 8.772.137.711	Rp 8.232.761.556

d. Kelompok Sasaran dan Pelayanan

Kelompok Sasaran Pelayanan Kebudayaan adalah

- Kelompok/ Group seni dan budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memberikan pembinaan kepada kelompok/ group seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tapin dan memberikan kesempatan untuk tampil pada event seni dan budaya.
- Pelaku Seni/ budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memberikan penghargaan kepada para pelaku seni budaya yang aktif berkontribusi terhadap kemajuan seni dan budaya Kabupaten Tapin
- Pelajar/ generasi muda
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin membina bibit-



bibit generasi muda terutama para pelajar untuk dibina dalam hal berkesenian dan diberikan kesempatan untuk tampil pada event seni dan budaya.

- Pemangku adat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin membina para pemangku adat dayak yang terus melestarikan warisan budaya adat dayak meratus serta mendukung kegiatan adat dan pemeliharaan rumah adat dayak meratus.
- Juru Pelihara Benda Cagar Budaya (BCB)
Untuk terpeliharanya Benda Cagar Budaya (BCB)/ Situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin menempatkan juru pelihara di setiap BCB/Situs yang ada di Kabupaten Tapin sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang ke tempat wisata religi

Kelompok Sasaran Pelayanan Pariwisata :

- Pelaku Usaha Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memberikan pembinaan dan pengasan terhadap para pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas para pelaku usaha pariwisata yang juga akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada wisatawan.
- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memberikan pembinaan kepada Pokdarwis untuk meningkatkan kualitas anggota Pokdarwis dalam pelayanan terhadap wisatawan juga dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada di daerah mereka.
- Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan kreatifitas sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar destinasi wisata yang menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif.
- Para Pelajar/ Generasi Muda
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memberikan kesempatan para pelajar/ generasi muda untuk mengikuti event pemilihan Duta Wisata Kabupaten Tapin untuk berkontribusi dalam kemajuan Pariwisata Kabupaten Tapin dan Pelestarian Seni Budaya



Tapin

- Desa Wisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin terus memberikan pembinaan dan pendampingan serta motivasi untuk Desa-Desa yang ada di Kabupaten Tapin yang memiliki potensi destinasi wisata untuk menjadi Desa Wisata sehingga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar desa wisata.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan adalah suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau suatu kesenjangan antara keadaan yang ada (actual condition) dengan keadaan yang diinginkan (ideal condition). Permasalahan biasanya muncul dari fakta atau data yang menunjukkan adanya hambatan, kendala, atau tantangan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Isu Strategis adalah permasalahan penting yang bersifat jangka panjang dan berdampak signifikan terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi atau daerah. Isu strategis tidak hanya mencerminkan masalah saat ini, tetapi juga mempertimbangkan tren, tantangan, dan peluang ke depan yang bisa memengaruhi kebijakan dan arah pembangunan.

Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari pencapaian sebelumnya sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat diharapkan dapat memberikan arah dtujuan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan yang diambil diharapkan dapat mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien.

2.2.1. Permasalahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka dalam perumusan permasalahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berikut ini akan dijabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :



Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan DISBUDPAR

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya amenitas, aksesibilitas dan atraksi di Destinasi Wisata bagi para wisatawan	Amenitas, aksesibilitas dan atraksi di destinasi wisata yang masih belum memadai atau belum sesuai dengan standart kepariwisataan	Kurangnya anggaran untuk pembangunan sarana dan sarana Pariwisata (amenitas aksesibilitas dan atraksi)
2	Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata	Kurangnya informasi Pariwisata yang bisa diakses oleh wisatawan dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait yang bergerak di bidang kepariwisataan	Kurangnya pemasaran /promosi Pariwisata melalui event wisata maupun melalui media massa, kurangnya Kerjasama/koordinasi dengan SKPD terkait, asosiasi, mitra dan komunitas pariwisata
3	Kurangnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Tidak adanya kesepakatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
4	Belum optimalnya pelayanan terhadap wisatawan	Kurangnya pelayanan terhadap wisatawan	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sapta pesona pariwisata
5	Kurangnya pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata	Masih terbatasnya pemahaman dan kreatifitas masyarakat pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi pariwisata	Kurangnya pembinaan dan pelatihan usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat
6	Kurangnya Koordinasi dengan para pemangku kesenian daerah	Belum adanya sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya	Kurangnya kerjasama pengembangan nilai-nilai budaya lokal dengan para pemangku kesenian daerah
7	Belum optimalnya kegiatan seni dan budaya daerah	Kurangnya penampilan group seni budaya daerah	Kurangnya event seni dan budaya daerah skala lokal dan regional
8	Belum optimalnya pelestarian budaya	Kurangnya pemahaman pelestarian budaya	Belum adanya standart, prosedur dan kriteria pelestarian budaya

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan Dinas Kebudayaan



dan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya amenities, aksesibilitas dan atraksi di Destinasi Wisata bagi para wisatawan

Kurangnya amenities maksudnya adalah kurangnya fasilitas dan layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi wisata, terutama terkait fasilitas seperti toilet dan fasilitas umum lainnya, minimnya hotel, penginapan, atau homestay yang layak, Kurangnya restoran atau tempat makan yang higienis dan sesuai selera wisatawan, layanan terkait minimnya informasi wisata, tidak adanya pemandu wisata, tidak ada fasilitas hiburan atau aktivitas pendukung (misalnya: pusat oleh-oleh, spa, pusat kebugaran. Hal ini akan berdampak Wisatawan kesulitan mendapatkan tempat bermalam atau makan, Waktu kunjungan menjadi singkat, Tidak ada fasilitas hiburan atau aktivitas pendukung seperti pusat oleh-oleh.

Kurangnya aksesibilitas mengacu pada kesulitan mencapai destinasi wisata, baik secara fisik (transportasi), maupun informasi, seperti Jalan menuju destinasi rusak atau sempit, Tidak tersedia transportasi umum atau sulit dijangkau dari kota besar, Minimnya penunjuk arah, papan informasi, atau peta wisata, Tidak ramah bagi wisatawan disabilitas atau lansia. Hal ini akan berdampak Wisatawan kesulitan atau enggan mengunjungi destinasi tersebut, Biaya dan waktu tempuh menjadi tinggi, Tidak ramah bagi wisatawan disabilitas atau lansia yang akan berdampak Wisatawan kesulitan atau enggan mengunjungi destinasi tersebut, Biaya dan waktu tempuh menjadi tinggi dan Potensi wisata tidak berkembang optimal.

Kurangnya atraksi maksudnya adalah kurangnya kegiatan atau objek yang menarik perhatian wisatawan dan membuat mereka ingin mengunjungi destinasi tersebut. Atraksi dapat berupa atraksi alam seperti pantai, gunung, air terjun dan lainnya, atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik tradisional, pameran seni, dan lainnya, atraksi buatan seperti taman hiburan, museum, pusat belanja dan lainnya. Atraksi di destinasi wisata dapat meningkatkan daya tarik destinasi tersebut dan membuat wisatawan ingin mengunjunginya kembali.

2. Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata

Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata dapat diartikan promosi atau penyebaran informasi tentang suatu tempat wisata masih kurang efektif, kurang menjangkau pasar yang luas, atau tidak sesuai dengan tren dan kebutuhan wisatawan. Hal ini disebabkan berbagai macam seperti dana promosi terbatas, terutama untuk daerah yang belum menjadi prioritas wisata nasional, Masih mengandalkan brosur, baliho, atau pameran offline, padahal wisatawan kini lebih banyak mencari info secara digital, kurang aktif di media sosial, belum memiliki website resmi yang informatif, atau tidak muncul di platform wisata seperti Google Maps, TripAdvisor, atau



Traveloka, Branding yang masih lemah atau belum bisa menarik perhatian wisatawan, Promosi hanya dilakukan saat ada event besar atau saat menjelang libur panjang, bukan secara berkelanjutan dan tidak melibatkan pelaku usaha pariwisata (hotel, agen perjalanan), influencer, atau komunitas lokal dalam promosi. Hal ini akan berdampak pada Destinasi kurang dikenal, meskipun punya potensi alam, budaya, atau sejarah yang kuat, Kunjungan wisatawan rendah atau stagnan,, Kalah bersaing dengan destinasi lain yang lebih aktif dipromosikan, Peluang ekonomi dan investasi pariwisata tidak berkembang.

3. Kurangnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Kurangnya kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berarti adanya minimnya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi di antara pihak-pihak yang seharusnya terlibat aktif dalam membangun sektor pariwisata. Pariwisata yang berkembang pesat memerlukan pendekatan kolaboratif yaitu melibatkan Pemerintah (regulator dan fasilitator), Swasta (investor dan pelaku usaha), Masyarakat (pemilik budaya dan lingkungan), Akademisi, dan Media. Penyebab dari kurangnya Kerjasama adalah Tidak adanya forum rutin atau wadah koordinasi antar-pemangku kepentingan, Ketidaksesuaian Visi dan Kepentingan, Masyarakat tidak tahu peran mereka, atau swasta tidak dilibatkan dalam perencanaan destinasi, Kurangnya program yang menggabungkan peran ketiga pihak secara langsung. Dampaknya adalah Pembangunan destinasi tidak berkelanjutan. Misalnya, pembangunan fisik dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai budaya atau ekologi setempat. Potensi lokal tidak tergali. Produk ekokraf atau atraksi budaya tidak terangkat karena masyarakat tidak dilibatkan. Investor enggan masuk. Karena tidak ada kepastian dukungan regulasi atau sosial dari masyarakat. Program pemerintah tidak berjalan efektif. Misalnya, pelatihan wisata dilakukan tapi masyarakat tidak tertarik karena tidak ada tindak lanjut.

4. Belum optimalnya pelayanan terhadap wisatawan.

Belum optimalnya pelayanan terhadap wisatawan berarti kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan belum memenuhi standar kenyamanan, keramahan, dan profesionalisme yang diharapkan. Pelayanan ini mencakup interaksi langsung maupun tidak langsung yang dialami wisatawan selama berada di destinasi wisata. Penyebabnya antara lain Petugas atau pelaku wisata kurang ramah, kurang terlatih dalam etika layanan, atau tidak mampu berbahasa asing, Minimnya papan informasi, brosur, petunjuk arah, atau pusat informasi wisata yang dapat diakses wisatawan, Pelayanan di Akomodasi dan Restoran yang kurang cepat, tidak profesional dan tidak sesuai standar Pariwisata serta Masyarakat local yang kurang ramah. Hal ini akan berdampak pada ketidakpuasan wisatawan, tingkat kunjungan ulang rendah., ulasan



negatif menyebar di media sosial dan platform wisata, Destinasi kalah saing dengan tempat lain yang lebih ramah dan professional, rugi secara ekonomi karena wisatawan tidak betah dan pengeluaran mereka terbatas.

5. Kurangnya pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata

Kurangnya pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata berarti minimnya individu, kelompok, atau UMKM lokal yang mengembangkan produk atau layanan berbasis kreativitas—seperti kerajinan, kuliner khas, seni pertunjukan, desain, atau digital—yang bisa menunjang dan memperkaya pengalaman wisatawan. Penyebab Kurangnya Pelaku Ekonomi Kreatif Kurangnya Pelatihan dan Pendampingan atau warga lokal tidak tahu cara mengembangkan atau memasarkan produk kreatif. Minimnya modal dan akses Pembiayaan, sulit bagi pelaku lokal untuk memulai atau mengembangkan usaha tanpa dukungan dana, Kurang Inspirasi atau Inovasi Produk, Masyarakat belum melihat pariwisata sebagai peluang ekonomi kreatif dan Belum tersedia tempat pameran, pelatihan desain, akses e-commerce, atau kerja sama dengan pelaku industri kreatif lainnya

6. Kurangnya Koordinasi dengan para pemangku kesenian daerah

Kurangnya koordinasi dengan para pemangku kesenian daerah berarti tidaknya terjalin hubungan atau kerja sama yang baik dan terstruktur antara pemerintah, pengelola wisata, dan pelaku seni budaya lokal—seperti seniman, sanggar seni, tokoh adat, atau komunitas budaya—dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata.

Kesenian daerah (tari tradisional, musik, pertunjukan, ritual budaya) adalah aset penting dalam pariwisata berbasis budaya, dan tanpa koordinasi yang baik, aset ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penyebab Kurangnya Koordinasi antara lain karena tidak adanya Forum atau Wadah Komunikasi antara Pemerintah dan seniman lokal, Event pariwisata sering digarap tanpa melibatkan seniman lokal sebagai bagian utama pertunjukan, minimnya Pendataan dan Pemetaan Pelaku Seni, Perbedaan Visi, Seniman ingin menjaga keaslian budaya, sementara pelaku wisata kadang ingin pertunjukan yang disesuaikan dengan selera pasar. Dampaknya adalah Kesenian daerah kurang terekspos di sektor Pariwisata, Wisata budaya jadi kurang hidup atau kehilangan keaslian. Pelaku seni merasa termarginalkan, tidak dihargai, dan seni budaya tidak berkembang.

7. Belum optimalnya kegiatan seni dan budaya daerah

Belum optimalnya kegiatan seni dan budaya daerah berarti berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian, pertunjukan, dan pengembangan kesenian serta budaya lokal masih belum berjalan maksimal, baik dari segi frekuensi, kualitas, dukungan, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pariwisata. Penyebab Belum



Optimalnya Kegiatan Seni Budaya adalah kurangnya dukungan Anggaran dan Fasilitas Kegiatan seni hanya digelar saat event besar atau hari tertentu, karena terbatasnya dana. Minimnya Perhatian Pemerintah atau Swasta, Kesenian dianggap tidak produktif secara ekonomi, sehingga tidak menjadi prioritas. Terbatasnya Regenerasi Pelaku Seni Dimana Anak muda kurang tertarik meneruskan tradisi karena dianggap kuno atau tidak menguntungkan, banyak kesenian lokal tidak dikenal karena jarang dipromosikan secara digital atau tidak terdokumentasi dengan baik. Banyak event budaya hanya digelar secara formalitas, tanpa tujuan pelestarian atau pemberdayaan yang nyata. Dampaknya adalah Kesenian daerah terancam punah., kurangnya pengalaman budaya bagi wisatawan. Potensi ekonomi budaya tidak tergarap. minimnya kebanggaan generasi muda terhadap budaya local, Destinasi wisata kehilangan kekhasan dan identitas lokal.

8. Belum optimalnya pelestarian budaya

Belum optimalnya pelestarian budaya berarti upaya untuk melindungi, merawat, mengembangkan, dan mewariskan budaya lokal—baik yang bersifat fisik maupun nonfisik—belum dilakukan secara maksimal, sehingga banyak warisan budaya yang mulai terlupakan, terpinggirkan, atau bahkan punah. Penyebab Belum Optimalnya Pelestarian Budaya adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat, budaya lokal dianggap kuno atau tidak relevan dengan zaman modern. Minimnya Dukungan Pemerintah, Anggaran pelestarian budaya terbatas dan kebijakan belum menyeluruh atau berkelanjutan. Tidak Adanya Regenerasi Pelaku Budaya, Generasi muda tidak tertarik mempelajari atau melanjutkan tradisi leluhur. Kurangnya Dokumentasi dan Digitalisasi, Banyak budaya tak terdokumentasi secara sistematis, sehingga sulit dikenalkan kembali jika hilang. Pengaruh Globalisasi, Gaya hidup modern dan budaya luar menggeser praktik budaya lokal. Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya, tidak ada wadah atau ruang bagi masyarakat untuk menampilkan dan mengembangkan budayanya. Dampak dari Pelestarian yang Tidak Optimal Punahnya warisan budaya lokal., Masyarakat kehilangan identitas dan jati diri, Generasi muda tidak mengenal sejarah dan tradisi leluhur, potensi budaya sebagai daya tarik wisata dan sumber ekonomi kreatif tidak tergarap.

2.2.2 Isu Strategis

Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal maupun eksternal, isu-isu strategis tersebut adalah :



Tabel 2.9
Isu Strategis DISBUDPAR Kabupaten Tapin

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Disbudpar	Permasalahan Disbudpar	Isu KLHS yang Relavan dengan Disbudpar	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Disbudpar			Isu Strategis Disbudpar
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan Pariwisata daerah	Kurangnya amenities, aksesibilitas dan atraksi di Destinasi Wisata bagi para wisatawan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Sustainable tourism/ Pariwisata berkelanjutan	Daya tarik destinasi pariwisata yang berkelanjutan	Terbatasnya amenities, aksesibilitas dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan	Terbatasnya amenities, aksesibilitas dan atraksi di destinasi wisata
	Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata		Unesco Global Geopark	Terbatasnya jangkauan pemasaran pariwisata		Terbatasnya pemasaran pariwisata
	Kurangnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata			Rendahnya kualitas ekosistem kreatif		Rendahnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
	Belum optimalnya pelayanan terhadap wisatawan			Rendahnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengelolaan dan Kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus	Kualitas pelayanan terhadap wisatawan yang tidak maksimal
	Kurangnya pelaku usaha				Kurangnya	Minimnya pelaku usaha



	ekonomi kreatif di sekitar destinasi wisata				Ketrampil an SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif	ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata
	Kurangnya Koordinasi dengan para pemangku kesenian daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Pengembang an SDM pranata kebudayaan		Kurangnya kerjasama antara pemerintah, lembaga kesenian, dan pemangku kesenian daerah
	Belum optimalnya kegiatan seni dan budaya daerah			Pengembang an sarana dan prasarana kebudayaan		Kurangnya kegiatan seni dan budaya daerah
	Belum optimalnya pelestarian budaya			Pelestarian sejarah dan warisan budaya		Rendahnya pelestarian budaya
	Belum Optimalnya Penetapan Cagar Budaya			Pengembang an SDM pranata kebudayaan		Rendahnya penetapan cagar budaya

1. Isu Strategis Bidang Kebudayaan

a. Rendahnya pelestarian budaya ;

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya



- b. Kurangnya kerjasama antara pemerintah, lembaga kesenian, dan pemangku kesenian daerah;
Kurangnya kerjasama antara pemerintah, lembaga kesenian, dan pemangku kesenian daerah dalam mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah sehingga kesenian daerah tidak terpromosikan dengan baik kepada masyarakat luas, Kesenian daerah tidak terlestarikan dengan baik karena kurangnya dukungan dan perhatian, Kesenian daerah tidak berkembang: Kesenian daerah tidak berkembang karena kurangnya inovasi dan kreativitas
- c. Kurangnya kegiatan seni dan budaya;
Kurangnya kegiatan seni dan budaya yang menampilkan kekayaan seni dan budaya daerah, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengalami dan menikmati kekayaan tersebut, hal ini membuat kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah dan kurangnya kesempatan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah
- d. Rendahnya Penetapan Cagar Budaya
Rendahnya perlindungan terhadap situs, bangunan, dan objek budaya yang bernilai sejarah dan budaya daerah sehingga membuat kerusakan dan kehancuran situs, bangunan, dan objek budaya yang tidak terlindungi.

2. Isu Strategis Bidang Pariwisata

- a. Terbatasnya amenities, aksesibilitas dan atraksi di destinasi wisata
Jika suatu destinasi memiliki keterbatasan dalam hal amenities maka akan membuat wisatawan kurang nyaman, jika aksesibilitas terbatas maka akan membuat wisatawan sulit datang dan apabila destinasi kurang atraksi maka kurang menarik minat wisatawan dengan kata lain membuat wisatawan cepat bosan. Hal ini akan membuat destinasi kompetitif dan akan sulit berkembang dalam industri pariwisata. Untuk mengatasi ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta untuk meningkatkan ketiganya secara berkelanjutan



b. Terbatasnya Pemasaran Pariwisata

Tanpa Pemasaran yang kuat maka destinasi wisata yang baguspun bisa sepi pengunjung. Terbatasnya pemasaran Pariwisata menghambat pertumbuhan sektor wisata, meskipun potensi alam, budaya dan atraksinya tinggi. Untuk mengatasi ini diperlukan branding destinasi, pemanfaatan media social dan website resmi, bekerjasama dengan influencer dan travel blogger, penyediaan video, photo, ulasan, google maps dan lain-lain

c. Rendahnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

Tanpa kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan pariwisata akan terhambat dan hasilnya tidak berkelanjutan. Sinergi ketiga pihak sangat penting agar wisata berkembang dengan manfaat yang adil dan merata. Untuk mengatasinya diperlukan membentuk forum koordinasi pariwisata daerah (melibatkan tiga pihak) Mengadakan pelatihan dan pemberdayaan Masyarakat Mendorong investasi swasta yang inklusif (bermanfaat untuk lokal) Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong kolaborasi, bukan jalan sendiri Mengembangkan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism)

d. Kualitas pelayanan terhadap wisatawan yang tidak maksimal

Pelayanan wisata adalah segala bentuk layanan yang diterima wisatawan selama perjalanan, mulai dari sambutan, informasi, keamanan, keramahan, fasilitas, hingga bantuan saat dibutuhkan. Kualitas pelayanan yang tidak maksimal artinya wisatawan merasa tidak puas karena pelayanan lambat, tidak ramah, atau tidak profesional, informasi wisata tidak jelas atau sulit diakses, fasilitas umum kurang bersih atau tidak layak, pemandu wisata tidak kompeten, kurangnya kemampuan komunikasi (misalnya bahasa asing), untuk mengatasi hal ini diperlukan, Pelatihan SDM Pariwisata, Peningkatan Sarana & Prasarana Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing, Mendorong Budaya Sapta Pesona



- e. Minimnya pelaku usaha ekonomi kreatif disekitar destinasi wisata
- Ekonomi kreatif di sektor pariwisata mencakup usaha berbasis ide dan kreativitas yang memberikan nilai tambah pada pengalaman wisatawan. Contohnya kerajinan tangan, kuliner khas, produk fashion lokal, jasa fotografi, pertunjukan seni. Minimnya pelaku usaha ekonomi kreatif berarti masih sedikit masyarakat atau UMKM yang menyediakan produk/layanan kreatif khas lokal, menjual souvenir atau makanan khas, mengembangkan bisnis berbasis seni, budaya, dan inovasi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dukungan Modal dan Akses Pasar, Kolaborasi dengan Seniman Lokal, Penciptaan Ruang Kreatif, Digitalisasi Produk Lokal.

Tabel 2.10.

Indikator SDgS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Target	Indikator	Program	Kegiatan
8.9 pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Jumlah wisatawan mancanegara	Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		
	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB		

Pada table di atas dapat dilihat bahwa target Indikator SDgS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2030 adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal dengan indikator Jumlah wisatawan mancanegara,



Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB.

Dengan target dan indikator tersebut diharapkandapat meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara serta meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pariwisata di Kabupaten Tapin. Adapun program yang mendukung indikator SDgS ini adalah Program Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi misi pembangunan daerah yang aspiratif dan berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan Kabupaten Tapin yang Maju dan Beriman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Penataan organisasi pemerintahan baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan selaras dengan Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tapin, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN
(BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN
BERKELANJUTAN)”**

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2029. Penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Tapin dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera dan Agamis Sejahtera dan Agamis, terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin yang berkualitas dan sejahtera serta saling berdampingan antar umat beragama



2. Maju, tercapainya pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan kemandirian ekonomi daerah serta pemenuhan pembangunan infrastruktur yang handal
3. Berkelanjutan, terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta ketahanan bencana yang responsive.
4. Berintegritas dan inovatif, terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin.

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Tapin yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

**“Misi 2 : Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah
Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri
Kreatif”**

Adapun tujuan pembangunan daerah terkait dengan Dinas Kebudayaan dan pariwisata adalah :

“ Meningkatkan kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif ”

Sedangkan sasaran yang terkait Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

” Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah ”

dengan indikator LPE kategori Pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum)

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Sasaran pembangunan daerah yang terkait Disbudpar adalah **” Meningkatkan pembangunan ekonomi sektor pariwisata unggulan daerah”**. Untuk mendukung perwujudan pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah tersebut, maka Disbudpar Kabupaten Tapin menetapkan sasaran strategis yakni, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing pariwisata Daerah
2. Meningkatkan Pelestarian Budaya
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Berikut ini adalah Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :



Tabel 3.1
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DISBUDPAR
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PADA TAHUN					2030
					2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata Unggulan Daerah	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata Unggulan Daerah		LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan	7,18	7.35	7.52	7.85	8.16	8.25	8,50
		Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	25,61	25,75	26	26,25	26,50	26,75	27
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	4 jam 58 menit	5 jam 15 menit	6 jam	6 jam 5 menit	6 jam 10 menit	6 jam 15 menit	6 jam 20 menit
			Rata-rata belanja wisatawan	600.000	610.000	630.000	650.000	675.000	700.000	725.000



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	7,14	10	10,71	14,28	17,85	21,42	25
			Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan	27,27	30	30,30	33,33	36,36	39,39	42,42
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Daerah	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,95	80	80	80,25	80,50	80,75	82
			Indeks Profesionalism e ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	73,81	80	80	80,25	80,50	80,75	81



Untuk Evaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran, telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama Renstra
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
TUJUAN OPD					
I.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata Unggulan Daerah	LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan	Definisi Operasional : Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dalam suatu wilayah atau negara selama periode waktu tertentu (biasanya per tahun)	$\frac{(\text{PDB sektor pariwisata tahun N} - \text{PDB sektor pariwisata N1})}{\text{PDB sektor pariwisata N1}} \times 100$	BPS Kabupaten Tapin
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Skor terukur yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program- program kegiatan pembangunan daerah, ditinjau dari keselarasan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja serta pencapaian hasil (outcome) yang mendukung efisiensi-efisiensi efektivitas penggunaan anggaran	Keterangan: - P1 = Nilai perencanaan kinerja - P2 = Nilai pengukuran kinerja - P3 = Nilai pelaporan kinerja - P4 = Nilai evaluasi kinerja internal - P5 = Nilai capaian kinerja (outcome)	Kemenpan RB



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SASARAN OPD					
1.	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	Definisi Operasional : Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan adalah perbandingan jumlah pengunjung/ wisatawan di Kabupaten Tapin baik lokal maupun mancanegara padah tahun n dengan tahun sebelumnya (n-1)	$\frac{(\text{Jumlah Wisatawan thn N} - \text{Jumlah Wisatawan thn N-1})}{\text{Jumlah Wisatawan thn N-1}} \times 100$	Disbudpar Kabupaten Tapin
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Definisi Operasional : yang dimaksud Lama Tinggal Wisatawan adalah jumlah malam atau hari atau waktu yang dihabiskan oleh wisatawan di Kabupaten Tapin	Kajian Rata-Rata Lama Tinggal	Disbudpar Kabupaten Tapin
		Rata-rata belanja wisatawan	Definisi Operasional : yang dimaksud dengan Belanja Wisatawan adalah berapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan oleh wisatawan perorang/perhari saat berwisata di Kabupaten Tapin (konsumsi, akomodasi, transportasi	Kajian Rata-Rata Belanja Wisatawan	Disbudpar Kabupaten Tapin
2.	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan	Definisi Operasional : Maksud dari Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Maksud Cagar Budaya yang dillestarikan adalah cagar	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100$	Disbudpar Kabupaten Tapin



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			budaya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark/tengaran dan nilai arsitekturnya		
		Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	Definisi Operasional : Maksud dari Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Maksud Cagar Budaya yang dillestarikan adalah cagar budaya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark/tengaran dan nilai arsitekturnya	$\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Tapin}} \times 100$	Disbudpar Kabupaten Tapin
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keterangan: - P1 = Nilai perencanaan kinerja (30) - P2 = Nilai pengukuran kinerja (30) - P3 = Nilai pelaporan kinerja (15) - P4 = Nilai evaluasi kinerja internal (25)	Inspektorat Kabupaten Tapin



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Definisi Operasional : Indeks Profesionalitas ASN atau IP-ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Hasil Penilaian dari aplikasi My ASN (myasn.bkn.go.id)	Aplikasi My ASN (myasn.bkn.go.id)



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.2.1 Strategi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai oleh perangkat daerah.

Adapun arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkret, dan operasional. Kebijakan juga membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan efektif dan efisien.

Sebagai upaya strategis dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin yaitu Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah dan Maningkanya Pelestarian Budaya strategi yang dirumuskan harus dapat diterjemahkan oleh setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kinerja tahunan, maka disusun penahapan Pembangunan dengan maksud prioritas Pembangunan tahunan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.3
Penahapan Rentra DISBUDPAR Kabupaten Tapin

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2026)	TAHAP IV (2027)	TAHAP V (2030)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan amenitas dan akseibilitas serta pengelolaan destinasi pariwisata	Meningkatkan amenitas dan akseibilitas serta pengelolaan destinasi pariwisata	Meningkatkan amenitas dan akseibilitas serta pengelolaan destinasi pariwisata	Meningkatkan amenitas dan akseibilitas serta pengelolaan destinasi pariwisata	Meningkatkan amenitas dan akseibilitas serta pengelolaan destinasi pariwisata
Meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan asosiasi, mitra dan komunitas yang bergerak dibidang pariwisata Daerah	Meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan asosiasi, mitra dan komunitas yang bergerak dibidang pariwisata Daerah	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sapta Pesona	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sapta Pesona	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sapta Pesona	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sapta Pesona	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sapta Pesona
Meningkatkan kreatifitas masyarakat pelaku usaha di sekitar destinasi pariwisata	Meningkatkan kreatifitas masyarakat pelaku usaha di sekitar destinasi pariwisata	Meningkatkan kreatifitas masyarakat pelaku usaha di sekitar destinasi pariwisata	Meningkatkannya jumlah pelaku ekonomi kreatif	Meningkatkannya jumlah pelaku ekonomi kreatif
Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya	Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya	Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya	Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya	Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya



3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari tujuan dan sasaran perangkat daerah serta telah disusun selaras dengan strategi. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional, potensi, tantangan, serta kebutuhan Masyarakat Kabupaten Tapin. Adapun fokus utama arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 terkait Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Pengembangan Produktivitas Sektor Pariwisata Unggulan Daerah. Untuk meningkatkan keberhasilan Produktivitas Sektor Pariwisata Unggulan Daerah dalam peningkatan kualitas ini juga bergantung pada komitmen dan integritas pajabat publik serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa reformasi yang dijalankan memberikan dampak bagi Masyarakat. Berikut ini adalah rumusan Arah Kebijakan Renstra Disbudpar Kabupaten Tapin :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan DISBUDPAR Kabupaten Tapin

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Pengembangan produktivitas sektor pertanian dan pariwisata unggulan daerah	Menetapkan prioritas pembangunan amenitas dan aksesibilitas serta pengelolaan destinasi pariwisata	
			Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan apresiasi Pokdarwis	
			Meningkatkan pemasaran pariwisata melalui event, promosi/pameran dan kerjasama dengan asosiasi, mitra dan komunitas pariwisata	
			Meningkatkan pembinaan dan pelatihan usaha ekonomi kreatif masyarakat	
2	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Mewujudkan Peningkatan Kualitas	Meningkatkan kerjasama pengembangan nilai-	



		Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi	nilai budaya lokal dengan para pemangku kesenian daerah	
			Meningkatkan pelaksanaan/penampilan event seni dan budaya daerah skala lokal dan regional	
			Menyusun standart, prosedur dan kriteria pelestarian warisan budaya dan cagar budaya	
			Menyusun standart, prosedur pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya	

3.2.3 Program-Program Prioritas dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari tujuan dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi Masyarakat. Program prioritas diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029.

Berikut ini adalah program prioritas berdasarkan hasil analisis pada program prioritas nasional urusan kebudayaan dan pariwisata :



Tabel 3.5
Program Prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Tapin Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional	Sasaran/Proyek/Kegiatan Prioritas	Program Prioritas 2025-2029
Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	- Program Pengembangan Kebudayaan. - Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pengelolaan Permuseuman
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	- Program Peningkatan Daya Tarik Wisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Disbudpar Kabupaten Tapin 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Disbudpar dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan 2030, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Disbudpar dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pada pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029. Dalam periode pembangunan 2025- 2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja Disbudpar Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029

Adapun IKU Disbudpar Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan thn } N - \text{Jumlah Wisatawan thn } N-1}{\text{Jumlah Wisatawan thn } N-1} \times 100$	%	25,61	25,75	26	26,25	26,50	26,75	27
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Kajian Rata-Rata Lama Tinggal	%	4 jam 58 menit	5 jam 15 menit	6 jam	6 jam 5 menit	6 jam 10 menit	6 jam 15 menit	6 jam 20 menit
3.	Rata-rata belanja wisatawan	Kajian Rata-Rata Belanja Wisatawan	%	600.000	610.000	630.000	650.000	675.000	700.000	725.000
4.	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100$	%	7,14	10	10,71	14,28	17,85	21,42	25
5.	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Tapin}} \times 100$	%	27,27	30	30,30	33,33	36,36	39,39	42,42
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LHE SAKIP dari Inspektorat Kab Tapin	Poin	78,95	80	80	80,25	80,50	80,75	82
7.	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Hasil Penilaian dari aplikasi My ASN (myasn.bkn.go.id)	Poin	73,81	80	80	80,25	80,50	80,75	81



4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disdukcapil Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah yang dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencaaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 1 (satu) Indikator IKK Oucome urusan Kebudayaan dan 4 (empat) IKK urusan Pariwisata.

Berikut ini Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PARIWISATA										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	9.76	10	10.25	10.7	11	11.75	12	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	25,61	25,75	26	26,25	26,50	26,75	27	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	80,86	81.25	81.8	82.3	82.79	83.15	83.67	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.03	2,04	2,14	2,24	2,34	2,44	2,54	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	9,18	9,43	9,68	9,93	10,18	10,43	10,68	
URUSAN KEBUDAYAAN										
1.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata sesuai permasalahan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah dan Peningkatan Pelestarian Budaya. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin.

Renstra Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin. Renstra Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.



LAMPIRAN

**CASCADING DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2025 - 2029**

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	BASELINE 2024	2025	TARGET					KET
					2026	2027	2028	2029	2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	1	3	4		5	6	7	8	9	10
KEPALA DINAS										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (score)	Nilai LHE SAKIP	78,95	80	80	80,25	80,50	80,75	81,00	
	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Hasil Penilaian IP-ASN dari Aplikasi MyASN	73,81	80	80	80,25	80,50	80,75	81,00	
SEKRETARIS										
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai LHE SAKIP	24,67	24,8	25	25	25,05	25,10	25,05	
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai LHE SAKIP	22,75	23,4	24	24,10	24,10	24,10	24,10	
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai LHE SAKIP	15,25	12,3	16	16,10	16,10	16,10	16,10	
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Nilai LHE SAKIP	12,3	19,5	14	14	14	14	14,05	
KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN										
Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Total rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti}}{\text{Total LHE AKIP}} \times 100$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Total laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti}}{\text{Total laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja}} \times 100$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
STAFF PERENCANAAN DAN PELAPORAN										
terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	
SEKRETARIS										
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Total temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total temuan pemeriksaan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
KASUBBAG KEUANGAN										
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	$\frac{\text{Total Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan}}{\text{Total surat pertanggungjawaban yang diajukan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	$\frac{\text{Total laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar}}{\text{Total laporan keuangan yang dilaporkan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENATA KEUANGAN)										
tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22	22	26	26	26	26	26	

terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	1	
terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	1	1	1	
SEKRETARIS										
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	$\frac{\text{Total ASN yang berkinerja} > 90\%}{\text{Total seluruh ASN}} \times 100$	90	90	90	90	90	90	90	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan	$\frac{\text{Total kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas}}{\text{Total ASN Perangkat daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENGADIMINISTRASI UMUM)										
tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Bahan Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	Jumlah paket bahan material yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	
tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	4	4	4	4	4	4	4	
2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	12	12	12	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	$\frac{\text{Total Barang Milik Daerah dalam kondisi baik}}{\text{Total Barang Milik Daerah Disbudpar}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENGADIMINISTRASI UMUM)										
tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	2	2	2	2	2	2	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	$\frac{\text{Total Barang Milik Daerah dalam kondisi baik}}{\text{Total Barang Milik Daerah Disbudpar}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENGADIMINISTRASI UMUM)										
tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	2	2	2	2	2	2	2	

terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	12	12	12	12	12	12	
terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/d rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/d rehabilitasi	2	2	2	2	2	2	2	
SEKRETARIS										
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (score)	Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat	4,3		4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi	$\frac{\text{Total ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian}}{\text{dengan baik}} \times 100$ Total ASN	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENGADMINISTRASI UMUM)										
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
KEPALA DINAS										
Meningkatkanya Pelestarian Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan (%)	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdada}} \times 100$	27,27	30	30,3	33,33	36,36	39,39	42,42	
	persentase cagar budaya yang ditetapkan (%)	$\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Tapin}} \times 100$	7,14	10	10,71	14,28	17,85	21,42	25	
KABID KEBUDAYAAN										
Meningkatnya promosi seni budaya	jumlah promosi kebudayaan yang dilaksanakan	jumlah promosi kebudayaan yang dilaksanakan	5	50	5	5	7	9	10	
JF PAMONG BUDAYA										
Meningkatnya event adat budaya	persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events	$\frac{\text{Event adat budaya yang masuk COE yg terlaksana}}{\text{Total Event adat budaya yang masuk COE}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
Terlaksananya kerjaasma event adat budaya	Jumlah Kerjasama Event adat budaya	jumlah kerjasama event adat budaya	1	0	2	3	4	5	6	
STAFF (JF ANALIS KEBUDAYAAN)										
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	4	3	3	3	3	3	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	26	40	40	40	40	40	40	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	1	3	3	3	3	3	

Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10	10	10	10	10	10	10	
KABID KESENIAN										
Meningkatnya promosi seni budaya	jumlah promosi kesenian yang terlaksana	jumlah promosi kesenian yang terlaksana	5	50	5	5	7	9	10	
JF PAMONG BUDAYA										
Terlaksananya partisipasi event seni budaya di luar daerah	Persentase event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender Event Luar Daerah	<i>Event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender event luar daerah</i> x 100 Total Kalender event Luar Daerah	30,00	30,00	30,50	30,80	30,90	31,00	32,00	
Meningkatnya event seni budaya	persentase event seni budaya yang terlaksana	<i>Event seni budaya yang terlaksana</i> x 100 Total Event seni budaya yang masuk COE	50,00	50,00	60,00	70,00	73,00	75,00	80,00	
Terlaksananya Kerjasama Event seni budaya	Jumlah Kerjasama Event Seni Budaya	jumlah kerjasama event seni budaya	0,00	0,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	
STAFF (JF ANALIS										
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	1	1	1	1	1	1	
JF PAMONG BUDAYA										
Terlaksananya pengusulan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda	Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda	<i>Jml Karya Budaya yang diusulkan menjadi WBTD</i> x 100 <i>Jumlah Karya Budaya yang terdata</i>	18,18	18,18	18,75	21,87	25	28,12	31,25	
Terlaksananya karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	<i>Jml Karya Budaya yang terdata dalam DAPOBUD</i> x 100 <i>Jumlah Karya Budaya yang terdata</i>	16,90	16,90	17,40	17,94	18,46	18,97	19,48	
STAFF (JF ANALIS KEBUDAYAAN)										
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	19	19	20	15	15	15	10	
KABID KESENIAN										
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	persentase kelompok seni budaya yang aktif	<i>Jumlah Kelompok Seni Budaya yang aktif</i> x 100 <i>Total Kelompok Seni Budaya yang terdata</i>	50	50	60	65	70	75	80	
Pengembangan Museum Digital	jumlah konten kesenian yang di digitalisasi	jumlah konten kesenian yang di digitalisasi	0	0	0	0	6	8	10	
JF PAMONG BUDAYA										
Terbentuknya dewan kesenian	jumlah dewan kesenian yang dibentuk sesuai standar	jumlah dewan kesenian yang dibentuk sesuai standar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Tersedianya wadah untuk mengapresiasi pelaku seni budaya	persentase sanggar seni budaya yang sesuai standar	<i>Sanggar seni budaya yang sesuai standar</i> x 100 <i>Total Sanggar seni budaya yang terdata</i>	8,90	8,95	16,00	17,00	17,50	18,00	18,50	

[illegible]

Terlaksananya Pengelolaan Museum	Jumlah Museum yang dikelola	Jumlah Museum yang dikelola	0	0	0	0	1	1	1	
terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0	0	0	0	6	8	10	
KEPALA DINAS										
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	$\frac{Jumlah\ Wisatawan\ thn\ N - Jumlah\ Wisatawan\ thn\ N-1}{Jumlah\ Wisatawan\ thn\ N-1} \times 100$	25,61	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	
	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (jam)	Kajian Rata-Rata Lama Tinggal	4 jam 58 menit	4 jam 58 menit	6 jam	6 Jam 5 menit	6 Jam 10 menit	6 Jam 15 menit	6 Jam 20 menit	
	Rata-Rata Belanja Wisatawan (Rp)	Kajian Rata-Rata Belanja Wisatawan	600000	600000	630000	650000	675000	700000	725000	
KABID PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (Attraction, Amenity, Accesibility)	$\frac{Jumlah\ Destinasi\ Wisata\ yang\ dikelola\ dengan\ baik}{Total\ destinasi\ wisata\ yang\ terdada} \times 100$	5	5	37,6	37,6	44,9	44,9	44,9	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	$\frac{Jumlah\ Sarana\ dan\ Prasarana\ destinasi\ wisata\ yang\ terpelihara}{Total\ Destinasi\ Wisata} \times 100$	30	30	36	36	36,5	36,75	37	
Tersedianya Master Plan Destinasi Wisata	Persentase Master Plan Destinasi Wisata yang menjadi DED	$\frac{Jumlah\ Master\ Plan\ Destinasi\ Wisata\ yang\ menjadi\ DED}{Total\ Master\ Plan\ Destinasi\ Wisata} \times 100$	0	0	2	5	7,5	10	15	
Tersedianya Detail Engineering Design (DED) Destinasi Wisata	Persentase DED yang terealisasi	$\frac{Jumlah\ DED\ yang\ terealisasi}{Total\ Master\ Plan\ Destinasi\ Wisata} \times 100$	0	0	2	5	7,5	10	15	
STAF (JF PENYULUH WISATA)										
terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	2	2	
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	0	0	1	2	2	4	4	
terlaksananya Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										

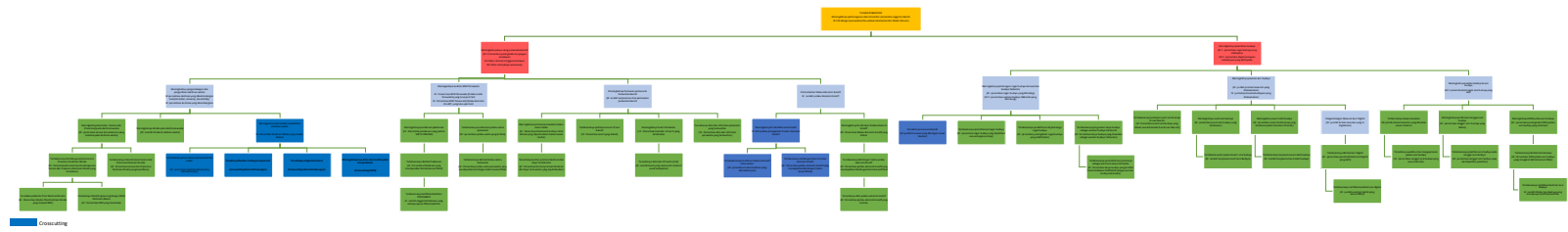
Meningkatnya Atraksi pada destinasi wisata	Jumlah Atraksi di destiasi wisata	Jumlah Atraksi di destiasi wisata	0	0	5	10	15	20	25	
STAF (JF PENYULUH WISATA)										
terlaksananya Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	0	1	1	1	
terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan destinasi wisata strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	2	2	2	2	2	
terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0	0	2	5	4	15	20	
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	4	1	4	4	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	persentase sarana dan prasarana yang tersedia pada destinasi wisata	$\frac{\text{Jml Sarana dan Prasarana yang tersedia di destinasi wisata}}{\text{Total Destinasi Wisata}} \times 100$	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
STAF (JF PENYULUH WISATA)										
terlaksananya Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	0	1	1	1	1	1	
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0	0	1	1	2	2	2	
terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	

[illegible]

Terlaksananya Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terdata	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdata}}{\text{Total Pelaku UMKM}} \times 100$	8,1	8,1	76	79,52	79,52	84,6	84,6	
STAF (JF ANALIS EKOKRAF)										
terlaksananya penguatan lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	0	1	1	2	3	4	
terlaksananya fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	0	0	1	1	1	1	1	
Terlaksananya penyusunan rencana strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya penyusunan Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	0	0	1	1	4	1	1	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	0	1	1	4	2	1	
KABID PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
KABID KEMITRAAN, JASA DAN PROMOSI PARIWISATA										
Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih}}{\text{Total SDM Pariwisata}} \times 100$	0	0	25	25,75	27,50	30	35	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
Terlaksananya pembinaan pelaku usaha pariwisata	persentase pelaku usaha pariwisata yang terbina	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang terbina}}{\text{Total Pelaku Usaha Pariwisata yang terdata}} \times 100$	25	25	11	11	12	12	13	
Terlaksananya Bimtek Pokdarwis	Persentase Pokdarwis yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Pokdarwis yang dibina}}{\text{Total Pokdarwis aktif}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Pembinaan Pelaku ekoraf	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	$\frac{\text{Jml Pelaku Ekoraf yang dibina}}{\text{Total Pelaku Ekonomi Kreatif}} \times 100$	20	20	8	8	9	9	10	
STAF (JF ANALIS EKOKRAF)										
Terlaksananya Fasilitasi Proses Kreasi Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	15	15	1	25	15	15	50	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50	50	50	50	50	50	50	

terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	0	0	1	0	0	10	10	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	50	50	50	50	50	50	50	
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	1	1	1	1	1	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
Terlaksananya Bimbingan teknis pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	<i>Jml Pelaku Ekokraf yang mendapatkan bimtek bersertifikat x 100</i> <i>Total Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	3	3	3,38	3,38	6,76	6,76	6,76	
STAF (JF ANALIS EKO KRAF)										
Terlaksananya Pelatihan Bimbingan teknis dan Pendampingan ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20	20	20	25	30	30	40	
terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	0	0	1	1	1	10	20	

- Kinerja Strategis
- Kinerja Urutan
- Kinerja Taktilikal
- Kinerja Operasional



**CASCADING DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2025 - 2029**

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	BASELINE 2024	2025	TARGET					KET
					2026	2027	2028	2029	2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	1	3	4		5	6	7	8	9	10
KEPALA DINAS										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (score)	Nilai LHE SAKIP	78,95	80	80	80,25	80,50	80,75	81,00	
	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Hasil Penilaian IP-ASN dari Aplikasi MyASN	73,81	80	80	80,25	80,50	80,75	81,00	
SEKRETARIS										
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai LHE SAKIP	24,67	24,8	25	25	25,05	25,10	25,05	
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai LHE SAKIP	22,75	23,4	24	24,10	24,10	24,10	24,10	
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai LHE SAKIP	15,25	12,3	16	16,10	16,10	16,10	16,10	
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Nilai LHE SAKIP	12,3	19,5	14	14	14	14	14,05	
KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN										
Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Total rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti}}{\text{Total LHE AKIP}} \times 100$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Total laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti}}{100} \times 100$ <i>Total laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
STAFF PERENCANAAN DAN PELAPORAN										
terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	
SEKRETARIS										
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Total temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total temuan pemeriksaan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
KASUBBAG KEUANGAN										
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	$\frac{\text{Total Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan}}{\text{Total surat pertanggungjawaban yang diajukan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	$\frac{\text{Total laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar}}{\text{Total laporan keuangan yang dilaporkan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENATA KEUANGAN)										
tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22	22	26	26	26	26	26	

terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	1	
terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	1	1	1	
SEKRETARIS										
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	$\frac{\text{Total ASN yang berkinerja} > 90\%}{\text{Total seluruh ASN}} \times 100$	90	90	90	90	90	90	90	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan	$\frac{\text{Total kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas}}{\text{Total ASN Perangkat daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENGADIMINISTRASI UMUM)										
tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Bahan Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	Jumlah paket bahan material yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	
tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	4	4	4	4	4	4	4	
2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	12	12	12	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	$\frac{\text{Total Barang Milik Daerah dalam kondisi baik}}{\text{Total Barang Milik Daerah Disbudpar}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENGADIMINISTRASI UMUM)										
tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	2	2	2	2	2	2	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	$\frac{\text{Total Barang Milik Daerah dalam kondisi baik}}{\text{Total Barang Milik Daerah Disbudpar}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENGADIMINISTRASI UMUM)										
tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	2	2	2	2	2	2	2	

terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	12	12	12	12	12	12	
terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/d rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/d rehabilitasi	2	2	2	2	2	2	2	
SEKRETARIS										
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (score)	Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat	4,3		4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi	$\frac{\text{Total ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian}}{\text{dengan baik}} \times 100$ Total ASN	100	100	100	100	100	100	100	
STAFF (PENGADMINISTRASI UMUM)										
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	
KEPALA DINAS										
Meningkatkannya Pelestarian Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan (%)	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdapat}} \times 100$	27,27	30	30,3	33,33	36,36	39,39	42,42	
	persentase cagar budaya yang ditetapkan (%)	$\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Tapin}} \times 100$	7,14	10	10,71	14,28	17,85	21,42	25	
KABID KEBUDAYAAN										
Meningkatnya promosi seni budaya	jumlah promosi kebudayaan yang dilaksanakan	jumlah promosi kebudayaan yang dilaksanakan	5	50	5	5	7	9	10	
JF PAMONG BUDAYA										
Meningkatnya event adat budaya	persentase event adat budaya yang terlaksana pada Calendar of Events	$\frac{\text{Event adat budaya yang masuk COE yg terlaksana}}{\text{Total Event adat budaya yang masuk COE}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
Terlaksananya kerjaasma event adat budaya	Jumlah Kerjasama Event adat budaya	jumlah kerjasama event adat budaya	1	0	2	3	4	5	6	
STAFF (JF ANALIS KEBUDAYAAN)										
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	4	3	3	3	3	3	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	26	40	40	40	40	40	40	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	1	3	3	3	3	3	

Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10	10	10	10	10	10	10	
KABID KESENIAN										
Meningkatnya promosi seni budaya	jumlah promosi kesenian yang terlaksana	jumlah promosi kesenian yang terlaksana	5	50	5	5	7	9	10	
JF PAMONG BUDAYA										
Terlaksananya partisipasi event seni budaya di luar daerah	Persentase event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender Event Luar Daerah	<i>Event seni budaya yang diikuti sesuai Kalender event luar daerah</i> x 100 Total Kalender event Luar Daerah	30,00	30,00	30,50	30,80	30,90	31,00	32,00	
Meningkatnya event seni budaya	persentase event seni budaya yang terlaksana	<i>Event seni budaya yang terlaksana</i> x 100 Total Event seni budaya yang masuk COE	50,00	50,00	60,00	70,00	73,00	75,00	80,00	
Terlaksananya Kerjasama Event seni budaya	Jumlah Kerjasama Event Seni Budaya	jumlah kerjasama event seni budaya	0,00	0,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	
STAFF (JF ANALIS										
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	1	1	1	1	1	1	
JF PAMONG BUDAYA										
Terlaksananya pengusulan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda	Persentase karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda	<i>Jml Karya Budaya yang diusulkan menjadi WBTD</i> x 100 <i>Jumlah Karya Budaya yang terdata</i>	18,18	18,18	18,75	21,87	25	28,12	31,25	
Terlaksananya karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	Persentase karya budaya yang terdata dalam database DAPOBUD sebagai warisan budaya tak benda	<i>Jml Karya Budaya yang terdata dalam DAPOBUD</i> x 100 <i>Jumlah Karya Budaya yang terdata</i>	16,90	16,90	17,40	17,94	18,46	18,97	19,48	
STAFF (JF ANALIS KEBUDAYAAN)										
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	19	19	20	15	15	15	10	
KABID KESENIAN										
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	persentase kelompok seni budaya yang aktif	<i>Jumlah Kelompok Seni Budaya yang aktif</i> x 100 <i>Total Kelompok Seni Budaya yang terdata</i>	50	50	60	65	70	75	80	
Pengembangan Museum Digital	jumlah konten kesenian yang di digitalisasi	jumlah konten kesenian yang di digitalisasi	0	0	0	0	6	8	10	
JF PAMONG BUDAYA										
Terbentuknya dewan kesenian	jumlah dewan kesenian yang dibentuk sesuai standar	jumlah dewan kesenian yang dibentuk sesuai standar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Tersedianya wadah untuk mengapresiasi pelaku seni budaya	persentase sanggar seni budaya yang sesuai standar	<i>Sanggar seni budaya yang sesuai standar</i> x 100 <i>Total Sanggar seni budaya yang terdata</i>	8,90	8,95	16,00	17,00	17,50	18,00	18,50	

[illegible]

Terlaksananya Pengelolaan Museum	Jumlah Museum yang dikelola	Jumlah Museum yang dikelola	0	0	0	0	1	1	1	
terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0	0	0	0	6	8	10	
KEPALA DINAS										
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	$\frac{Jumlah\ Wisatawan\ thn\ N - Jumlah\ Wisatawan\ thn\ N-1}{Jumlah\ Wisatawan\ thn\ N-1} \times 100$	25,61	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	
	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (jam)	Kajian Rata-Rata Lama Tinggal	4 jam 58 menit	4 jam 58 menit	6 jam	6 Jam 5 menit	6 Jam 10 menit	6 Jam 15 menit	6 Jam 20 menit	
	Rata-Rata Belanja Wisatawan (Rp)	Kajian Rata-Rata Belanja Wisatawan	600000	600000	630000	650000	675000	700000	725000	
KABID PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (Attraction, Amenity, Accesibility)	$\frac{Jumlah\ Destinasi\ Wisata\ yang\ dikelola\ dengan\ baik}{Total\ destinasi\ wisata\ yang\ terdata} \times 100$	5	5	37,6	37,6	44,9	44,9	44,9	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang terpelihara	$\frac{Jumlah\ Sarana\ dan\ Prasarana\ destinasi\ wisata\ yang\ terpelihara}{Total\ Destinasi\ Wisata} \times 100$	30	30	36	36	36,5	36,75	37	
Tersedianya Master Plan Destinasi Wisata	Persentase Master Plan Destinasi Wisata yang menjadi DED	$\frac{Jumlah\ Master\ Plan\ Destinasi\ Wisata\ yang\ menjadi\ DED}{Total\ Master\ Plan\ Destinasi\ Wisata} \times 100$	0	0	2	5	7,5	10	15	
Tersedianya Detail Engineering Design (DED) Destinasi Wisata	Persentase DED yang terealisasi	$\frac{Jumlah\ DED\ yang\ terealisasi}{Total\ Master\ Plan\ Destinasi\ Wisata} \times 100$	0	0	2	5	7,5	10	15	
STAF (JF PENYULUH WISATA)										
terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	2	2	
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	0	0	1	2	2	4	4	
terlaksananya Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										

Meningkatnya Atraksi pada destinasi wisata	Jumlah Atraksi di destiasi wisata	Jumlah Atraksi di destiasi wisata	0	0	5	10	15	20	25	
STAF (JF PENYULUH WISATA)										
terlaksananya Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	0	1	1	1	
terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan destinasi wisata strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	2	2	2	2	2	
terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0	0	2	5	4	15	20	
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	4	1	4	4	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	persentase sarana dan prasarana yang tersedia pada destinasi wisata	$\frac{\text{Jml Sarana dan Prasarana yang tersedia di destinasi wisata}}{\text{Total Destinasi Wisata}} \times 100$	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
STAF (JF PENYULUH WISATA)										
terlaksananya Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	0	1	1	1	1	1	
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0	0	1	1	2	2	2	
terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1	

[illegible]

Terlaksananya Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terdata	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdata}}{\text{Total Pelaku UMKM}} \times 100$	8,1	8,1	76	79,52	79,52	84,6	84,6	
STAF (JF ANALIS EKOKRAF)										
terlaksananya penguatan lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	0	1	1	2	3	4	
terlaksananya fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	0	0	1	1	1	1	1	
Terlaksananya penyusunan rencana strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0	0	1	1	1	1	1	
terlaksananya penyusunan Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	0	0	1	1	4	1	1	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	0	1	1	4	2	1	
KABID PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
KABID KEMITRAAN, JASA DAN PROMOSI PARIWISATA										
Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih}}{\text{Total SDM Pariwisata}} \times 100$	0	0	25	25,75	27,50	30	35	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
Terlaksananya pembinaan pelaku usaha pariwisata	persentase pelaku usaha pariwisata yang terbina	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang terbina}}{\text{Total Pelaku Usaha Pariwisata yang terdata}} \times 100$	25	25	11	11	12	12	13	
Terlaksananya Bimtek Pokdarwis	Persentase Pokdarwis yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Pokdarwis yang dibina}}{\text{Total Pokdarwis aktif}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Pembinaan Pelaku ekoraf	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	$\frac{\text{Jml Pelaku Ekoraf yang dibina}}{\text{Total Pelaku Ekonomi Kreatif}} \times 100$	20	20	8	8	9	9	10	
STAF (JF ANALIS EKOKRAF)										
Terlaksananya Fasilitasi Proses Kreasi Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	15	15	1	25	15	15	50	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50	50	50	50	50	50	50	

terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	0	0	1	0	0	10	10	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	50	50	50	50	50	50	50	
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	1	1	1	1	1	
JF ADHYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF										
Terlaksananya Bimbingan teknis pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan teknis bersertifikat	<i>Jml Pelaku Ekokraf yang mendapatkan bimtek bersertifikat x 100</i> <i>Total Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	3	3	3,38	3,38	6,76	6,76	6,76	
STAF (JF ANALIS EKOAKRAF)										
Terlaksananya Pelatihan Bimbingan teknis dan Pendampingan ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20	20	20	25	30	30	40	
terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	0	0	1	1	1	10	20	

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata											
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah, Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (%)	7,18	7,35	7,52	7,85	8,16	8,25	8,5	
			Nilai SAKIP (poin)	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
		Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan (%)	27,27	30	30,3	33,33	36,36	39,39	42,42	
			Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	7,14	10	10,71	14,28	17,85	21,42	25	
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	25,61	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	
			Rata-rata lama tinggal wisatawan (Jam)	4,97	5,25	6	6,08	6,17	6,25	6,33	
			Rata-rata belanja wisatawan (Rp)	600.000	610.000	630.000	650.000	675.000	700.000	725.000	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disbudpar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	78,95	80	80	80,25	80,5	80,75	82	
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	73,81	80	80	80,25	80,5	80,75	81	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.519.469.143,00		6.519.469.143,00		6.583.930.143,00		6.559.469.143,00		6.591.712.143,00	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.434.655.073,00		5.434.655.073,00		5.434.655.073,00		5.434.655.073,00		5.434.655.073,00	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan Kinerja (Nilai)	24,67	25	25	10.516.600,00	25	10.516.600,00	25,05	10.516.600,00	25,05	10.516.600,00	25,10	10.516.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,75	24	24		24,15		24,20		24,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan		
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	15,25	16	16		16,10		16,10		16,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan		
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	12,3	14	15		15,15		15,15		15,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan		
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.836.969.388,00	100	3.836.969.388,00	100	3.836.969.388,00	100	3.836.969.388,00	100	3.836.969.388,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:%) (%)	90	90	90	1.215.383.565,00	90	1.215.383.565,00	90	1.215.383.565,00	90	1.215.383.565,00	90	1.215.383.565,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	4,3	4,3	4,3	371.785.520,00	4,4	371.785.520,00	4,4	371.785.520,00	4,4	371.785.520,00	4,4	371.785.520,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					413.225.250,00		413.225.250,00		413.225.250,00		413.225.250,00		413.225.250,00	
Meningkatnya promosi seni budaya	Jumlah promosi kesenian yang dilaksanakan (Kali)	5	5	5	413.225.250,00	5	413.225.250,00	7	413.225.250,00	9	413.225.250,00	10	413.225.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Jumlah promosi kebudayaan yang dilaksanakan (Kali)	2	2	2		3		3		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif (%)	81	0	60	483.021.620,00	65	483.021.620,00	70	483.021.620,00	75	483.021.620,00	80	483.021.620,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					188.567.200,00		188.567.200,00		188.567.200,00		188.567.200,00		188.567.200,00	
Meningkatnya Pelindungan Cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilindungi (%)	21,2	0	25	188.567.200,00	28,57	188.567.200,00	32,14	188.567.200,00	35,71	188.567.200,00	39,28	188.567.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya Tak benda yang dilindungi (%)	16,9	0	17,43		17,94		18,46		18,97		19,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0,00		0,00		64.461.000,00		40.000.000,00		72.243.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan museum daerah	Jumlah Museum daerah yang dikelola dengan baik (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	1	64.461.000,00	1	40.000.000,00	1	72.243.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.113.599.148,00		1.527.937.652,00		1.881.915.273,00		2.212.668.568,00		2.641.049.413,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					395.898.983,00		703.114.700,00		1.000.832.108,00		1.262.831.200,00		1.447.636.700,00	
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikelola dengan baik (Attraction, Amenity, Accesibility) (%)	5	30	37,6	395.898.983,00	37,6	703.114.700,00	44,9	1.000.832.108,00	44,9	1.262.831.200,00	44,9	1.447.636.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					408.765.050,00		408.765.050,00		473.226.050,00		408.765.050,00		408.765.050,00	
Meningkatnya Perluasan pemasaran pariwisata daerah	Persentase Kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah sesuai yang ditargetkan (%)	25	0	25	408.765.050,00	35	408.765.050,00	50	473.226.050,00	65	408.765.050,00	80	408.765.050,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					55.625.150,00		124.186.937,00		154.547.150,00		205.415.150,00		344.597.150,00	
Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:%) (%)	-13	0,5	1	55.625.150,00	1,2	124.186.937,00	1,5	154.547.150,00	1,8	205.415.150,00	2,1	344.597.150,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					253.309.965,00		291.870.965,00		253.309.965,00		335.657.168,00		440.050.513,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata (Pelaku Usaha Pariwisata) yang lulus post test (%)	0	0	25	253.309.965,00	25,75	291.870.965,00	27,50	253.309.965,00	30	335.657.168,00	35	440.050.513,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase SDM Pariwisata (Pelaku Ekonomi Kreatif) yang lulus post test (%)	0	0	25		25,75		27,50		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					7633068291.00		8047406795.00		8465845416.00		8772137711.00		9232761556.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah, Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (%)		
					Nilai SAKIP (poin)		
		Meningkatnya Pelestarian Budaya			Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan (%)		
					Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%)		
		Meningkatnya promosi seni budaya			Jumlah promosi kesenian yang dilaksanakan (Kali)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Jumlah promosi kebudayaan yang dilaksanakan (Kali)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya event adat budaya, Terlaksananya event adat budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya wadah untuk mengapresiasi pelaku seni budaya, Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kelembagaan seni budaya, Terlaksananya pelatihan seni budaya pada sanggar seni budaya, Meningkatnya SDM pelaku seni budaya, Terlaksananya Bimtek Seni Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya pengusulan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda, Persentase karya budaya yang terdata dalam database DOPABUD sebagai warisan budaya tak benda	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional		Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Terlaksananya partisipasi event seni budaya di luar daerah, Terlaksananya Pementasan seni budaya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya Pelindungan Cagar budaya dan warisan budaya		Persentase Cagar Budaya yang dilindungi (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Warisan Budaya Tak benda yang dilindungi (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Terlaksanya pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
				Terlaksananya pengelolaan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
			Meningkatnya pengelolaan museum daerah		Jumlah Museum daerah yang dikelola dengan baik (Unit)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
					Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)		
					Rata-rata lama tinggal wisatawan (Jam)		
					Rata-rata belanja wisatawan (Rp)		
			Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata		Persentase Destinasi Wisata yang dikelola dengan baik (Attraction, Amenity, Accesibility) (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata, Tersedianya Master Plan Destinasi Wisata, Tersedianya Detail Engineering Design (DED) Destinasi Wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Atraksi pada destinasi wisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Amenitas (Sarana dan Prasarana) pada destinasi wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
					Persentase Kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah sesuai yang ditargetkan (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Perluasan pemasaran Pariwisata daerah	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:%) (%)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan)	3.26.04.2.02.0019 - Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata		Persentase SDM Pariwisata (Pelaku Usaha Pariwisata) yang lulus post test (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
					Persentase SDM Pariwisata (Pelaku Ekonomi Kreatif) yang lulus post test (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Terlaksananya pembinaan pelaku usaha pariwisata, Terlaksananya Bimtek Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0005 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Bimbingan teknis pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0007 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disbudpar	Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
					Nilai Komponen AKIP-Perencanaan Kinerja (Nilai)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:%) (%)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.22.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat			Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)		
			Meningkatnya Pelayanan Sekretariat		Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.519.469.143,00		6.519.469.143,00		6.583.930.143,00		6.559.469.143,00		6.591.712.143,00		
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.434.655.073,00		5.434.655.073,00		5.434.655.073,00		5.434.655.073,00		5.434.655.073,00		
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan Kinerja (Nilai)	24,67	25	10.516.600,00	25	10.516.600,00	25,05	10.516.600,00	25,05	10.516.600,00	25,10	10.516.600,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,75	24		24,15		24,20		24,20		24,20			
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	15,25	16		16,10		16,10		16,10		16,20			
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	12,3	15		15		15,15		15,15		15,25			
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.516.600,00		10.516.600,00		10.516.600,00		10.516.600,00		10.516.600,00		
Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13	13	10.516.600,00	13	10.516.600,00	13	10.516.600,00	13	10.516.600,00	13	10.516.600,00		
2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.516.600,00		10.516.600,00		10.516.600,00		10.516.600,00		10.516.600,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13	13	10.516.600,00	13	10.516.600,00	13	10.516.600,00	13	10.516.600,00	13	10.516.600,00		
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.836.969.388,00	100	3.836.969.388,00	100	3.836.969.388,00	100	3.836.969.388,00	100	3.836.969.388,00		
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.836.969.388,00		3.836.969.388,00		3.836.969.388,00		3.836.969.388,00		3.836.969.388,00		
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	26	3.836.969.388,00	26	3.836.969.388,00	26	3.836.969.388,00	26	3.836.969.388,00	26	3.836.969.388,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.828.645.988,00		3.828.645.988,00		3.828.645.988,00		3.828.645.988,00		3.828.645.988,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	26	3.828.645.988,00	26	3.828.645.988,00	26	3.828.645.988,00	26	3.828.645.988,00	26	3.828.645.988,00		
2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.161.700,00		4.161.700,00		4.161.700,00		4.161.700,00		4.161.700,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.161.700,00	1	4.161.700,00	1	4.161.700,00	1	4.161.700,00	1	4.161.700,00		
2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.161.700,00		4.161.700,00		4.161.700,00		4.161.700,00		4.161.700,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	4.161.700,00	1	4.161.700,00	1	4.161.700,00	1	4.161.700,00	1	4.161.700,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:%) (%)	90	90	1.215.383.565,00	90	1.215.383.565,00	90	1.215.383.565,00	90	1.215.383.565,00	90	1.215.383.565,00		
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				979.194.580,00		979.194.580,00		979.194.580,00		979.194.580,00		979.194.580,00		
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	979.194.580,00	12	979.194.580,00	12	979.194.580,00	12	979.194.580,00	12	979.194.580,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.870.300,00		6.870.300,00		6.870.300,00		6.870.300,00		6.870.300,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6.870.300,00	12	6.870.300,00	12	6.870.300,00	12	6.870.300,00	12	6.870.300,00		
2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.438.200,00		68.438.200,00		68.438.200,00		68.438.200,00		68.438.200,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	68.438.200,00	12	68.438.200,00	12	68.438.200,00	12	68.438.200,00	12	68.438.200,00		
2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				324.954.480,00		324.954.480,00		324.954.480,00		324.954.480,00		324.954.480,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	324.954.480,00	12	324.954.480,00	12	324.954.480,00	12	324.954.480,00	12	324.954.480,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.137.200,00		20.137.200,00		20.137.200,00		20.137.200,00		20.137.200,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.137.200,00	12	20.137.200,00	12	20.137.200,00	12	20.137.200,00	12	20.137.200,00		
2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				3.107.400,00		3.107.400,00		3.107.400,00		3.107.400,00		3.107.400,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	3.107.400,00	0	3.107.400,00	0	3.107.400,00	0	3.107.400,00	0	3.107.400,00		
2.22.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.620.000,00		5.620.000,00		5.620.000,00		5.620.000,00		5.620.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	5.620.000,00	4	5.620.000,00	4	5.620.000,00	4	5.620.000,00	4	5.620.000,00		
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550.067.000,00		550.067.000,00		550.067.000,00		550.067.000,00		550.067.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	550.067.000,00	12	550.067.000,00	12	550.067.000,00	12	550.067.000,00	12	550.067.000,00		
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				163.863.020,00		163.863.020,00		163.863.020,00		163.863.020,00		163.863.020,00		
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12	163.863.020,00	12	163.863.020,00	12	163.863.020,00	12	163.863.020,00	12	163.863.020,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				108.027.800,00		108.027.800,00		108.027.800,00		108.027.800,00		108.027.800,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12	108.027.800,00	12	108.027.800,00	12	108.027.800,00	12	108.027.800,00	12	108.027.800,00		
2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.835.220,00		55.835.220,00		55.835.220,00		55.835.220,00		55.835.220,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	55.835.220,00	2	55.835.220,00	2	55.835.220,00	2	55.835.220,00	2	55.835.220,00		
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.325.965,00		72.325.965,00		72.325.965,00		72.325.965,00		72.325.965,00		
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	72.325.965,00	2	72.325.965,00	2	72.325.965,00	2	72.325.965,00	2	72.325.965,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12		12		12		12		12			
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				33.684.150,00		33.684.150,00		33.684.150,00		33.684.150,00		33.684.150,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	33.684.150,00	2	33.684.150,00	2	33.684.150,00	2	33.684.150,00	2	33.684.150,00		
2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.590.115,00		14.590.115,00		14.590.115,00		14.590.115,00		14.590.115,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	14.590.115,00	12	14.590.115,00	12	14.590.115,00	12	14.590.115,00	12	14.590.115,00		
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.051.700,00		24.051.700,00		24.051.700,00		24.051.700,00		24.051.700,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	24.051.700,00	2	24.051.700,00	2	24.051.700,00	2	24.051.700,00	2	24.051.700,00		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	4,3	4,3	371.785.520,00	4,4	371.785.520,00	4,4	371.785.520,00	4,4	371.785.520,00	4,4	371.785.520,00		
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				371.785.520,00		371.785.520,00		371.785.520,00		371.785.520,00		371.785.520,00		
Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	371.785.520,00	12	371.785.520,00	12	371.785.520,00	12	371.785.520,00	12	371.785.520,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12				12		12					
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				173.983.520,00		173.983.520,00		173.983.520,00		173.983.520,00		173.983.520,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	173.983.520,00	12	173.983.520,00	12	173.983.520,00	12	173.983.520,00	12	173.983.520,00		
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				197.802.000,00		197.802.000,00		197.802.000,00		197.802.000,00		197.802.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	197.802.000,00	12	197.802.000,00	12	197.802.000,00	12	197.802.000,00	12	197.802.000,00		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				413.225.250,00		413.225.250,00		413.225.250,00		413.225.250,00		413.225.250,00		
Meningkatnya promosi seni budaya	Jumlah promosi kesenian yang dilaksanakan (Kali)	5	5	413.225.250,00	5	413.225.250,00	7	413.225.250,00	9	413.225.250,00	10	413.225.250,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Jumlah promosi kebudayaan yang dilaksanakan (Kali)	2	2		3		3		4		4			
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				64.490.900,00		64.490.900,00		64.490.900,00		64.490.900,00		64.490.900,00		
Meningkatnya event adat budaya, Terlaksananya event adat budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2	3	64.490.900,00	3	64.490.900,00	3	64.490.900,00	3	64.490.900,00	3	64.490.900,00		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	26	40		40		40		40					
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				47.456.000,00		47.456.000,00		47.456.000,00		47.456.000,00		47.456.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2	3	47.456.000,00	3	47.456.000,00	3	47.456.000,00	3	47.456.000,00	3	47.456.000,00		
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				17.034.900,00		17.034.900,00		17.034.900,00		17.034.900,00		17.034.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	26	40	17.034.900,00	40	17.034.900,00	40	17.034.900,00	40	17.034.900,00	40	17.034.900,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				171.966.350,00		240.527.350,00		236.427.350,00		246.861.350,00		244.209.350,00		
Tersedianya wadah untuk mengapresiasi pelaku seni budaya, Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan seni budaya, Terlaksananya pelatihan seni budaya pada sanggar seni budaya, Meningkatkan SDM pelaku seni budaya, Terlaksananya Bimtek Seni Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1	3	171.966.350,00	3	240.527.350,00	3	236.427.350,00	3	246.861.350,00	3	244.209.350,00		
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				70.445.150,00		70.445.150,00		70.445.150,00		70.445.150,00		70.445.150,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1	3	70.445.150,00	3	70.445.150,00	3	70.445.150,00	3	70.445.150,00	3	70.445.150,00		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				51.521.200,00		101.521.200,00		101.521.200,00		101.521.200,00		101.521.200,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1	51.521.200,00	1	101.521.200,00	1	101.521.200,00	1	101.521.200,00	1	101.521.200,00		
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				50.000.000,00		68.561.000,00		64.461.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	10	10	50.000.000,00	10	68.561.000,00	10	64.461.000,00	10	74.895.000,00	10	72.243.000,00		
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				176.768.000,00		108.207.000,00		112.307.000,00		101.873.000,00		104.525.000,00		
Terlaksananya pengusulan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda, Persentase karya budaya yang terdata dalam database DOPABUD sebagai warisan budaya tak benda	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	19	20	176.768.000,00	15	108.207.000,00	15	112.307.000,00	15	101.873.000,00	15	104.525.000,00		
2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				176.768.000,00		108.207.000,00		112.307.000,00		101.873.000,00		104.525.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	19	20	176.768.000,00	15	108.207.000,00	15	112.307.000,00	15	101.873.000,00	15	104.525.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif (%)	81	60	483.021.620,00	65	483.021.620,00	70	483.021.620,00	75	483.021.620,00	80	483.021.620,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00		483.021.620,00		
Terlaksananya partisipasi event seni budaya di luar daerah, Terlaksananya Pementasan seni budaya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	50	483.021.620,00	60	483.021.620,00	75	483.021.620,00	80	483.021.620,00	100	483.021.620,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	38	40		40		50		60		75			
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	47	47		50		53		55		60			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				152.166.600,00		152.166.600,00		152.166.600,00		152.166.600,00		152.166.600,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	50	152.166.600,00	60	152.166.600,00	75	152.166.600,00	80	152.166.600,00	100	152.166.600,00		
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				146.191.920,00		146.191.920,00		146.191.920,00		146.191.920,00		146.191.920,00		
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	38	40	146.191.920,00	40	146.191.920,00	50	146.191.920,00	60	146.191.920,00	75	146.191.920,00		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				184.663.100,00		184.663.100,00		184.663.100,00		184.663.100,00		184.663.100,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	47	47	184.663.100,00	50	184.663.100,00	53	184.663.100,00	55	184.663.100,00	60	184.663.100,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				188.567.200,00		188.567.200,00		188.567.200,00		188.567.200,00		188.567.200,00		
Meningkatnya Pelindungan Cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilindungi (%)	21,2	25	188.567.200,00	28,57	188.567.200,00	32,14	188.567.200,00	35,71	188.567.200,00	39,28	188.567.200,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Persentase Warisan Budaya Tak benda yang dilindungi (%)	16,9	17,43		17,94		18,46		18,97		19,48			
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				20.950.000,00		20.950.000,00		20.950.000,00		20.950.000,00		20.950.000,00		
Terlaksana pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2	3	20.950.000,00	4	20.950.000,00	5	20.950.000,00	6	20.950.000,00	7	20.950.000,00		
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				20.950.000,00		20.950.000,00		20.950.000,00		20.950.000,00		20.950.000,00		
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2	3	20.950.000,00	4	20.950.000,00	5	20.950.000,00	6	20.950.000,00	7	20.950.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				167.617.200,00		167.617.200,00		167.617.200,00		167.617.200,00		167.617.200,00		
Terlaksananya pengelolaan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	24	25	167.617.200,00	25	167.617.200,00	26	167.617.200,00	26	167.617.200,00	27	167.617.200,00		
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				167.617.200,00		167.617.200,00		167.617.200,00		167.617.200,00		167.617.200,00		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	24	25	167.617.200,00	25	167.617.200,00	26	167.617.200,00	26	167.617.200,00	27	167.617.200,00		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				0,00		0,00		64.461.000,00		40.000.000,00		72.243.000,00		
Meningkatnya pengelolaan museum daerah	Jumlah Museum daerah yang dikelola dengan baik (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	64.461.000,00	1	40.000.000,00	1	72.243.000,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				0,00		0,00		64.461.000,00		40.000.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Bimtek Seni Digital, Terlaksananya sertifikasi keahlian seni digital	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	6	64.461.000,00	8	40.000.000,00	10	72.243.000,00		
2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				0,00		0,00		64.461.000,00		40.000.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	6	64.461.000,00	8	40.000.000,00	10	72.243.000,00		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.113.599.148,00		1.527.937.652,00		1.881.915.273,00		2.212.668.568,00		2.641.049.413,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				395.898.983,00		703.114.700,00		1.000.832.108,00		1.262.831.200,00		1.447.636.700,00		
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikelola dengan baik (Attraction, Amenity, Accesibility) (%)	5	37,6	395.898.983,00	37,6	703.114.700,00	44,9	1.000.832.108,00	44,9	1.262.831.200,00	44,9	1.447.636.700,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				70.000.000,00		162.122.000,00		193.383.000,00		309.580.000,00		361.215.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata, Tersedianya Master Plan Destinasi Wisata, Tersedianya Detail Engineering Design (DED) Destinasi Wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	70.000.000,00	1	162.122.000,00	1	193.383.000,00	1	309.580.000,00	1	361.215.000,00		
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0	1		2		2		4		4			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	1		1		1		2		2			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	0	1		1		1		1		1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		25.000.000,00		64.461.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	0	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	64.461.000,00	1	74.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		34.280.500,00		32.230.500,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	1	10.000.000,00	1	34.280.500,00	1	32.230.500,00	2	74.895.000,00	2	72.243.000,00		
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				10.000.000,00		34.280.500,00		32.230.500,00		34.895.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	34.280.500,00	1	32.230.500,00	1	34.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		34.280.500,00		32.230.500,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0	1	10.000.000,00	2	34.280.500,00	2	32.230.500,00	4	74.895.000,00	4	72.243.000,00		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		34.280.500,00		32.230.500,00		50.000.000,00		72.243.000,00		
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	34.280.500,00	1	32.230.500,00	1	50.000.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				216.748.700,00		303.870.700,00		415.144.108,00		516.328.700,00		616.842.200,00		
Meningkatnya Atraksi pada destinasi wisata	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	216.748.700,00	1	303.870.700,00	1	415.144.108,00	1	516.328.700,00	1	616.842.200,00		
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0	2		5		4		15		20			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		4		1		4		4			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	1		1		1		1		1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				20.000.000,00		34.280.500,00		64.461.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	34.280.500,00	1	64.461.000,00	1	74.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				10.000.000,00		34.280.500,00		64.461.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	34.280.500,00	1	64.461.000,00	1	74.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				141.748.700,00		141.748.700,00		191.748.700,00		191.748.700,00		291.748.700,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	0	2	141.748.700,00	2	141.748.700,00	2	191.748.700,00	2	191.748.700,00	2	291.748.700,00		
3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				20.000.000,00		34.280.500,00		64.473.408,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	1	20.000.000,00	1	34.280.500,00	1	64.473.408,00	1	74.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				20.000.000,00		34.280.500,00		25.000.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0	2	20.000.000,00	5	34.280.500,00	4	25.000.000,00	15	74.895.000,00	20	72.243.000,00		
3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5.000.000,00		25.000.000,00		5.000.000,00		25.000.000,00		36.121.500,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	5.000.000,00	4	25.000.000,00	1	5.000.000,00	4	25.000.000,00	4	36.121.500,00		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				109.150.283,00		237.122.000,00		392.305.000,00		436.922.500,00		469.579.500,00		
Meningkatnya Amenitas (Sarana dan Prasarana) pada destinasi wisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	109.150.283,00	1	237.122.000,00	1	392.305.000,00	1	436.922.500,00	1	469.579.500,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	1		1		2		2		2			
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	1		1		1		1		1			
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				10.000.000,00		34.280.500,00		25.000.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	1	10.000.000,00	1	34.280.500,00	1	25.000.000,00	1	74.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5.000.000,00		34.280.500,00		64.461.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	34.280.500,00	1	64.461.000,00	1	74.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				37.075.283,00		34.280.500,00		64.461.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	0	1	37.075.283,00	1	34.280.500,00	1	64.461.000,00	1	74.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				37.075.000,00		34.280.500,00		64.461.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	1	37.075.000,00	1	34.280.500,00	2	64.461.000,00	2	74.895.000,00	2	72.243.000,00		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5.000.000,00		25.000.000,00		64.461.000,00		37.447.500,00		36.121.500,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	25.000.000,00	1	64.461.000,00	1	37.447.500,00	1	36.121.500,00		
3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		37.447.500,00		36.121.500,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	1	5.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	37.447.500,00	1	36.121.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		40.000.000,00		64.461.000,00		25.000.000,00		72.243.000,00		
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	40.000.000,00	1	64.461.000,00	1	25.000.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya				5.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		37.447.500,00		36.121.500,00		
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	37.447.500,00	1	36.121.500,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				408.765.050,00		408.765.050,00		473.226.050,00		408.765.050,00		408.765.050,00		
Meningkatnya Perluasan pemasaran Pariwisata daerah	Persentase Kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah sesuai yang ditargetkan (%)	25	25	408.765.050,00	35	408.765.050,00	50	473.226.050,00	65	408.765.050,00	80	408.765.050,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				408.765.050,00		408.765.050,00		473.226.050,00		408.765.050,00		408.765.050,00		
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	0	1	408.765.050,00	1	408.765.050,00	1	473.226.050,00	1	408.765.050,00	1	408.765.050,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				197.406.400,00		197.406.400,00		197.406.400,00		197.406.400,00		197.406.400,00		
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	4	197.406.400,00	4	197.406.400,00	4	197.406.400,00	4	197.406.400,00	4	197.406.400,00		
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				57.498.000,00		57.498.000,00		57.498.000,00		57.498.000,00		57.498.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	57.498.000,00	1	57.498.000,00	1	57.498.000,00	1	57.498.000,00	1	57.498.000,00		
3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				5.000.000,00		5.000.000,00		69.461.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	69.461.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				126.218.650,00		126.218.650,00		126.218.650,00		126.218.650,00		126.218.650,00		
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	4	4	126.218.650,00	4	126.218.650,00	4	126.218.650,00	4	126.218.650,00	4	126.218.650,00		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				22.642.000,00		22.642.000,00		22.642.000,00		22.642.000,00		22.642.000,00		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	4	4	22.642.000,00	4	22.642.000,00	4	22.642.000,00	4	22.642.000,00	4	22.642.000,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				55.625.150,00		124.186.937,00		154.547.150,00		205.415.150,00		344.597.150,00		
Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:%) (%)	-13	1	55.625.150,00	1,2	124.186.937,00	1,5	154.547.150,00	1,8	205.415.150,00	2,1	344.597.150,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA				55.625.150,00		124.186.937,00		154.547.150,00		205.415.150,00		344.597.150,00		
Terlaksananya Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan)	0	0	55.625.150,00	1	124.186.937,00	1	154.547.150,00	1	205.415.150,00	1	344.597.150,00		
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	0		1		0		0		1			
	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitas penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				0,00		5.000.000,00		34.461.000,00		37.447.500,00		72.243.000,00		
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	34.461.000,00	1	37.447.500,00	1	72.243.000,00		
3.26.04.2.02.0014 - Fasilitas penguatan Kekayaan Intelektual				0,00		53.561.787,00		64.461.000,00		74.895.000,00		72.243.000,00		
Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitas penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	0	1	0,00	1	53.561.787,00	1	64.461.000,00	1	74.895.000,00	1	72.243.000,00		
3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				55.625.150,00		55.625.150,00		55.625.150,00		55.625.150,00		55.625.150,00		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	1	55.625.150,00	1	55.625.150,00	1	55.625.150,00	1	55.625.150,00	1	55.625.150,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04.2.02.0019 - Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				0,00		5.000.000,00		0,00		37.447.500,00		72.243.000,00		
Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	0,00	1	37.447.500,00	1	72.243.000,00		
3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	72.243.000,00		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				253.309.965,00		291.870.965,00		253.309.965,00		335.657.168,00		440.050.513,00		
Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata (Pelaku Usaha Pariwisata) yang lulus post test (%)	0	25	253.309.965,00	25,75	291.870.965,00	27,50	253.309.965,00	30	335.657.168,00	35	440.050.513,00	2.22.3.26.0.00.01.00 00 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Persentase SDM Pariwisata (Pelaku Ekonomi Kreatif) yang lulus post test (%)	0	25		25,75		27,50		30		35			
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				175.598.700,00		214.159.700,00		175.598.700,00		240.493.700,00		310.096.248,00		
Terlaksananya pembinaan pelaku usaha pariwisata, Terlaksananya Bimtek Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	0	1	175.598.700,00	0	214.159.700,00	0	175.598.700,00	10	240.493.700,00	10	310.096.248,00		
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1		25		15		15		50			
3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				35.000.000,00		68.561.000,00		30.000.000,00		37.447.500,00		72.243.000,00		
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1	35.000.000,00	25	68.561.000,00	15	30.000.000,00	15	37.447.500,00	50	72.243.000,00		
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30.387.500,00		50.387.500,00		50.387.500,00		40.387.500,00		70.387.500,00		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	50	50	30.387.500,00	50	50.387.500,00	50	50.387.500,00	50	40.387.500,00	50	70.387.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		37.447.500,00		36.121.500,00		
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	0	1	15.000.000,00	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00	10	37.447.500,00	10	36.121.500,00		
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				47.605.600,00		45.211.200,00		45.211.200,00		95.211.200,00		95.211.200,00		
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	50	50	47.605.600,00	50	45.211.200,00	50	45.211.200,00	50	95.211.200,00	50	95.211.200,00		
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				47.605.600,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		36.133.048,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	47.605.600,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	36.133.048,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				77.711.265,00		77.711.265,00		77.711.265,00		95.163.468,00		129.954.265,00		
Terlaksananya Bimbingan teknis pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	1	77.711.265,00	1	77.711.265,00	1	77.711.265,00	10	95.163.468,00	20	129.954.265,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	20	20				25		30		30			40
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				57.711.265,00		57.711.265,00		57.711.265,00		57.711.265,00		57.711.265,00		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	20	20	57.711.265,00	25	57.711.265,00	30	57.711.265,00	30	57.711.265,00	40	57.711.265,00		
3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		37.452.203,00		72.243.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	10	37.452.203,00	20	72.243.000,00		

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,18	7,35	7,52	7,85	8,16	8,25	8,5	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai SAKIP	poin	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	25,61	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
1.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya promosi seni budaya	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
2.	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
			2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
3.	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya Pelindungan Cagar budaya dan warisan budaya	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
			2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
4.	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya pengelolaan museum daerah	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
			2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
5.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
6.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Perluasan pemasaran Pariwisata daerah	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
7.	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah 3.26.04.2.02.0014 - Fasilitas penguatan Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah 3.26.04.2.02.0019 - Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah 3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
8.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.0005 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	25,61	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jam	4,97	5,25	6	6,08	6,17	6,25	6,33	
3	Rata-rata belanja wisatawan	Rp	600.000	610.000	630.000	650.000	675.000	700.000	725.000	
4	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	%	7,14	10	10,71	14,28	17,85	21,42	25	
5	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan	%	27,27	30	30,3	33,33	36,36	39,39	42,42	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,95	80	80	80,25	80,5	80,75	82	
7	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	73,81	80	80	80,25	80,5	80,75	81	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
2.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	positif	%	25,61	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	